ISSN 2527-3140

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TINJAUAN EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL

Menavigasi Gejolak Pasar Keuangan Global

EDISI IV TAHUN 2023

Ulasan Khusus:

- Gejolak Pasar Keuangan Global dan Efeknya Terhadap Sektor Keuangan Indonesia
- Perekonomian Tiongkok di Tengah Pusaran Geofragmentasi Dunia

Edisi IV 2023

Foto Sampul: Digital design: bussinessman trading on line stock market

Tinjauan Kebijakan Fiskal diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan periode publikasi triwulanan dan memuat mengenai perkembangan kebijakan ekonomi, fiskal, dan keuangan terkini.

Diterbitkan oleh:
Badan Kebijakan Fiskal

Pengarah:
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Penanggung Jawab:
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Dewan Redaksi:
Sekretaris Badan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral

Editor:
Titik Anas, Rahadian Zulfadin, Munafsin Al Arif

Kontributor
Perkembangan Ekonomi Global: Wahyu Septia Wijayanti, Putri Rizky Yulianti, Innes Clara Shinta, Yayu Andini

Perkembangan Ekonomi Domestik
Pertumbuhan Ekonomi: Yasir Niti Samudro, Aep Soleh, Dimas Nurdy Prasetya, Yogi Kristanto, Nina Hanifah, Eta Nur Khumayda
Perkembangan Kesejahteraan: Achmad Budi Setyawan, Rina Karlina, Retno Maruti, Galuh Chandra Wibowo
Inflasi: Roni Parasian, Raditiyo Harya Pamungkas, Tri Achya Ngasuko, Hilda Choirunnisah, Nurul Putri Rakhmawati, Adik Tejo Waskito
Pasar Modal: Risyaf Fahreza
Sektor Keuangan: Masyitha Mutiara Ramadhan
Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan: M. Afdi Nizar
Moneter dan Nilai Tukar: Thomas N.P.D. Keraf, Afif Hanifah, Iis Iskandar, Cipto Adhi Setiawan, Celina Faramitha
Pendapatan: Achmad Budi Setyawan, Aep Soleh, M. Syarif Mulyadi, Sidiq Suryo Nugroho
Belanja: Ahmad Wira Kusuma, Ginanjar Wibowo, Aep Soleh, Desi Dwi Bastias, Yogi Kristanto, Fakhri Rizki Saputra
Pembiayaan dan Risiko: Widodo Ramadyanto, Immanuel Bekti Hartanto

Ulasan Khusus
Gejolak Pasar Keuangan Global dan Efeknya terhadap Sektor Keuangan Indonesia: Thomas N.P.D. Keraf, Afif Hanifah, Iis Iskandar, Cipto Adhi Setiawan, Celina Faramitha
Perekonomian Tiongkok di Tengah Pusaran Geofragmentasi Dunia: Bagus Handoko, Widiani Putri, Wahyu Septia Wijayanti
Perkembangan Kebijakan Terkini: Bidang Program Analisis Kebijakan, PKEM

Desain Grafis: Angga Ekoprasetyo Wirastomo, Abraham Putra Agung, Cessa Seftari, Fatima Medina Septiyanti, Jefri Kurniawan Sidauruk

Foto Sampul/Foto Ilustrasi:
Freepik, Bramantyo

Sekretariat:
Suhendi Ery Saputro, Prabu Kusuma Nusa Putra, Ardhian Dharma Yudha Handoyo, Jefri Kurniawan Sidauruk, Tomy Dasmanto, Swasti Dian Arnany, Celina Faramitha

Alamat Redaksi:
Gedung R.M. Notohamiprodjo, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

Situs Web: fiskal.kemenkeu.go.id

TINJAUAN
EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL

Edisi IV 2023

KATA PENGANTAR

Di penghujung tahun 2023 ini, perekonomian dunia masih dihadapkan pada beragam tantangan. Pengetatan kebijakan moneter global masih terus berlanjut atau yang kita sebut dengan istilah *high for longer*. Kondisi tersebut dipicu perkembangan inflasi di negara-negara ekonomi utama yang masih di atas target. Sementara itu, harga komoditas menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif lambat, dan untuk komoditas pangan seperti gandum, beras, dan kedelai, mengalami fluktuasi harga yang dipicu oleh faktor anomali cuaca. Dari sisi perkembangan PMI manufaktur, mayoritas negara-negara dunia masih mengalami kontraksi, meski untuk PMI manufaktur Indonesia masih tercatat ekspansif. Selain itu, tensi geopolitik turut memberikan tantangan tersendiri bagi prospek pertumbuhan.

Hal yang patut kita syukuri adalah kinerja ekonomi Indonesia masih tetap kuat di tengah dinamika perekonomian global. PDB triwulan III 2023 tumbuh positif sebesar 4,94 persen (yoy). Meskipun angka tersebut melambat dibandingkan periode sebelumnya, Indonesia termasuk salah satu negara dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kinerja sektor-sektor produksi unggulan juga tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi positif juga tercatat merata terjadi di semua kawasan. Perekonomian Indonesia tumbuh kuat didukung oleh permintaan domestik dan investasi yang menunjukkan pertumbuhan yang impresif. APBN sebagai instrumen fiskal senantiasa dioptimalkan dalam menjaga momentum pemulihan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka memberikan informasi ke masyarakat, Badan Kebijakan Fiskal menerbitkan Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Fiskal (TEKF), yaitu tinjauan triwulanan terkait kinerja kondisi ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal. TEKF edisi IV Tahun 2023 ini mengambil tema "Menavigasi Gejolak Pasar Keuangan Global" dan menghadirkan dua ulasan khusus yaitu "Gejolak Pasar Keuangan Global dan Efeknya terhadap Sektor Keuangan Indonesia" dan "Perekonomian Tiongkok di Tengah Pusaran Geofragmentasi Dunia".

Kami berharap tinjauan ini dapat menjadi bahan rujukan bagi seluruh pihak dalam memahami kondisi ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal saat ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung terbitnya tinjauan ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke depan.

Selamat membaca.

Desember 2023
Febrio Nathan Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
ABREVIASI 3
RINGKASAN EKSEKUTIF 5
PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI 8
Perkembangan Perekonomian Global 10
Perekonomian global masih dihadapkan pada tingginya risiko dan ketidakpastian 10
Perkembangan Ekonomi Domestik 16
Kinerja perekonomian Indonesia terjaga di tengah perlambatan perekonomian global 16
APBN memperlihatkan kinerja yang lebih kuat ditopang oleh pendapatan negara yang tumbuh positif dan belanja negara yang tumbuh optimal 31
ULASAN KHUSUS 37
Gejolak Pasar Keuangan Global dan Efeknya terhadap Sektor Keuangan Indonesia 39
Pengetatan kebijakan moneter global masih berlangsung 39
Kebijakan moneter Indonesia di tengah dinamika sektor keuangan global 40
Perekonomian Tiongkok di Tengah Pusaran Geofragmentasi Dunia 44
Jejak ekonomi dan pembangunan Tiongkok 44
Dinamika perekonomian Tiongkok pascapandemi Covid-19 45
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TERKINI 50
Perkembangan Kebijakan Terkini 52
Kebijakan fiskal 52
Kebijakan moneter dan sektor keuangan 57

ABREVIASI

7DRR	:	*7-day Reverse Repo Rate*
Alutsista	:	Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia
AP	:	*Administered Price*
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	:	Amerika Serikat
ASEAN	:	The Association of Southeast Asian Nations
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
Bansos	:	Bantuan Sosial
Bapanas	:	Badan Pangan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BI	:	Bank Indonesia
BK	:	Bea Keluar
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
BLU	:	Badan Layanan Umum
BM	:	Bea Masuk
BMN	:	Barang Milik Negara
BPJS	:	Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
BPS	:	Badan Pusat Statistik
bps	:	basis points
BUK	:	Bank Umum Konvensional
BUS	:	Bank Umum Syariah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CAR	:	Capital Adequacy Ratio
CDS	:	*Credit Default Swap*
CHT	:	Cukai Hasil Tembakau
cif	:	Cost Insurance Freight
CPO	:	Crude Palm Oil
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DHE	:	Devisa Hasil Ekspor
DMO	:	Domestic Market Obligation
DPK	:	Dana Pihak Ketiga
EMs	:	Emerging Markets
FFR	:	*Federal Funds Rate*
FLPP	:	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
GFC	:	Global Financial Crisis
FOB	:	*Free on Board*
FOMC	:	Federal Open Market Committee
FTA	:	Free Trade Agreement
GWM	:	Giro Wajib Minimum
HT	:	Hasil Tembakau
ICP	:	*Indonesian Crude Price*
IHK	:	Indeks Harga Konsumen
IHSG	:	Indeks Harga Saham Gabungan
IKN	:	Ibu Kota Negara
IMF	:	International Monetary Fund
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPO	:	*Initial Public Offering*
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
K/L	:	Kementerian dan Lembaga
KI	:	Kredit Investasi
KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
KK	:	Kredit Konsumsi
KKB	:	Kredit Kendaran Bermotor
KLCI	:	Kuala Lumpur Composite Index
KMK	:	Kredit Modal Kerja
KND	:	Kekayaan Negara Dipisahkan
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
LNPRT		Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga
LPG	:	Liquefied Petroleum Gas
MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Migas	:	Minyak dan Gas Bumi

mtm	:	Month to month
MTN	:	Medium Term Note
NDA	:	Net Domestic Asset
NFA	:	Net Foreign Asset
NFB	:	Net Foreign Buy
NIM	:	Net Interest Margin
NPI	:	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	:	*Non-performing loan*
NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
NTP	:	Nilai Tukar Petani
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
Otsus	:	Otonomi Khusus
PADG	:	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PAYDI	:	Produk asuransi yang dikaitkan investasi
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PJK	:	Penyedia Jasa Keuangan
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKP	:	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
PMI	:	Purchasing Managers' Index
PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	:	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Polri	:	Kepolisian Republik Indonesia
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPI	:	Producer Price Index
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPN DN	:	Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PPSK	:	Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan
PSN	:	Proyek Strategis Nasional
PUJK	:	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
qoq	:	quarter over quarter
RoA	:	Return on Assets
rt	:	Rumah Tangga
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SBN	:	Surat Berharga Negara
SDA	:	sumber daya alam
SET	:	Stock Exchange of Thailand
SiLPA/SiKPA	:	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SRBI	:	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
STI	:	Straits Time Index
SUN	:	Surat Utang Negara
TB	:	Transaksi Berjalan
THR	:	Tunjangan Hari Raya
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TKD	:	Transfer ke Daerah
TMF	:	Transaksi Modal dan Finansial
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPID	:	Tim Pengendali Inflasi Daerah
TPIP	:	Tim Pengendali Inflasi Pusat
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TMF	:	Transaksi Modal dan Finansial
USD	:	US Dollar
UST	:	US Treasury
VF	:	*Volatile Food*
WEO	:	World Economic Outlook
WTO	:	Worlf Trade Organization
Wisman	:	Wisatawan Mancanegara
Wisnas	:	Wisatawan Nasional
Yoy	:	*year-on-year*
Ytd	:	*year to date*

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perekonomian global masih dihadapkan pada dinamika tingginya risiko dan ketidakpastian. Secara umum, pertumbuhan ekonomi global pada triwulan III tahun 2023 masih lemah, dengan divergensi antarwilayah yang melebar. Inflasi global melanjutkan tren penurunan, namun masih berada di atas target bank sentral negara maju. Hal ini mengindikasikan masih akan berlanjutnya kebijakan moneter *high for longer*. Peningkatan tensi geopolitik turut memberikan tantangan bagi prospek pertumbuhan. Sementara itu, harga komoditas menunjukkan perkembangan yang beragam dengan tren yang relatif melambat. Tekanan kenaikan harga minyak mereda setelah sempat mengalami kenaikan akibat perang di Timur Tengah. Komoditas pangan seperti gandum, beras, dan kedelai, mengalami fluktuasi harga yang dipicu oleh faktor anomali cuaca. Di sisi lain, aktivitas manufaktur global pada masih berada di zona kontraksi termasuk di antaranya AS (49,4), negara-negara di Eropa (44,2), dan Jepang (48,3), sementara PMI manufaktur Indonesia masih masuk dalam level ekspansif.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif terjaga di tengah meningkatnya risiko dan perlambatan ekonomi global. PDB triwulan III 2023 tumbuh positif sebesar 4,94 persen (yoy). Meskipun melambat dibandingkan periode sebelumnya, Indonesia termasuk salah satu negara dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Perekonomian Indonesia tumbuh kuat didukung oleh permintaan domestik, sejalan dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama pertumbuhan triwulan III 2023, tumbuh 5,06 persen (yoy). Konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2023 mengalami kontraksi sebesar 3,8 persen (yoy). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) / Investasi menunjukkan kinerja impresif. Pertumbuhan PMTB tercatat sebesar 5,8 persen (yoy) pada triwulan III 2023. Meskipun demikian, tren perlambatan ekonomi dunia menahan laju pertumbuhan ekspor dan impor nasional. Ekspor barang dan jasa terkontraksi sebesar 4,3 persen (yoy) akibat pelemahan permintaan global, sementara impor juga terkontraksi sebesar 6,2 persen (yoy). Dari sisi produksi, kinerja sektor-sektor unggulan juga tumbuh positif, termasuk sektor primer. Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua kawasan.

Tingkat inflasi masih terkendali. Pada bulan November 2023, inflasi tercatat sebesar 2,86 persen (yoy). Meskipun pergerakan tren inflasi menunjukkan peningkatan sejak bulan September, peningkatannya masih lebih rendah dari tingkat inflasi di bulan Agustus yang sebesar 3,27 persen (yoy). Inflasi inti dan *administered price* (AP) menunjukkan tren perlambatan. Sementara itu, inflasi *volatile food* (VF) meningkat tajam hingga 7,59 persen (yoy) dibandingkan bulan Agustus yang masih di level 2,42 persen (yoy). Tren peningkatan inflasi komponen ini didorong oleh peningkatan harga pangan terutama beras dan komoditas hortikultura akibat fenomena El Nino. Stabilisasi pasokan dilakukan antara lain melalui impor beras di tengah restriksi impor oleh berbagai produsen global. Pemerintah juga mengoptimasi peran *shock absorber* dengan memperpanjang penyaluran bantuan pangan dari September sampai bulan Desember untuk kelompok miskin dan rentan, serta memberikan bantuan langsung tunai dampak El Nino pada bulan November-Desember. Bantuan-bantuan ini diharapkan dapat

menjaga daya beli dan menahan kenaikan harga pangan lebih lanjut.

Kondisi perekonomian yang terus membaik dan inklusif diikuti oleh perbaikan kondisi ketenagakerjaan pada Agustus 2023. Pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga mendorong penambahan lapangan kerja baru. Jumlah orang bekerja tercatat 139,85 juta orang, meningkat 4,55 juta orang dibandingkan Agustus 2022. Hal ini tercermin pula pada meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mencapai 69,48 persen, meningkat sebesar 0,85 poin persentase dibandingkan Agustus 2022. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) konsisten berada pada tren menurun. TPT Agustus 2023 tercatat mencapai 5,32 persen, turun sebesar 0,54 poin persentase dari Agustus 2022 yang sebesar 5,86 persen. Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah telah menetapkan anggaran prioritas untuk berbagai bidang di tahun 2024, antara lain anggaran untuk pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan, termasuk untuk mendukung berbagai agenda pembangunan di tahun 2024 seperti penurunan angka *stunting*. Di sisi lain, upaya penciptaan lapangan kerja terus dilakukan, antara lain melalui pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi serta penguatan *link & match* dengan pasar kerja melalui vokasi dan sertifikasi.

Kinerja pasar keuangan tetap positif di tengah meningkatnya risiko pasar keuangan global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus menguat sepanjang triwulan terakhir pada tahun 2023. Hingga 15 Desember 2023, IHSG tercatat menguat sebesar 4,97 persen (*ytd*). Di kawasan ASEAN, kinerja IHSG menjadi yang terbaik di tengah pelemahan indeks di kawasan. Salah satu pendorong menguatnya IHSG memasuki triwulan IV 2023 adalah optimisme investor terhadap berakhirnya pengetatan kebijakan moneter the Fed di tahun 2024. Sementara itu, pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan kinerja yang solid. Meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia dan pengelolaan fiskal Pemerintah menjadi faktor penopang menguatnya kinerja pasar SBN. Hal tersebut tercermin dari *yield* SBN berbagai tenor yang mengalami penurunan cukup dalam sehingga berpengaruh positif terhadap penurunan biaya utang Pemerintah.

Kinerja sektor eksternal masih terjaga. Secara kumulatif, ekspor dan impor hingga bulan Oktober 2023 mengalami kontraksi. Ekspor tercatat sebesar USD214,41 miliar atau terkontraksi 12,2 persen (ytd, fob, USD), sementara impor mencapai USD183,19 miliar atau terkontraksi 7,7 persen (ytd, cif, USD). Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan secara kumulatif tercatat surplus sebesar USD31,22 miliar, terdiri atas surplus nonmigas sebesar USD47,02 miliar dan defisit migas sebesar USD15,81 miliar. Penurunan ekspor didorong oleh penurunan ekspor migas dan nonmigas, terutama karena faktor harga komoditas yang cenderung turun di tengah peningkatan volume ekspor sebagai indikasi masih kuatnya permintaan dari mitra dagang Indonesia. Di sisi lain, impor juga terkontraksi, didorong terutama oleh penurunan harga komoditas migas dan nonmigas yang dibarengi dengan peningkatan volume impor, sebagai indikasi aktivitas produksi dan permintaan domestik yang masih tinggi. Sementara itu, neraca pembayaran Indonesia pada triwulan III 2023 membaik. Neraca pembayaran Indonesia mencatatkan defisit sebesar USD1,46 miliar, membaik dibandingkan defisit triwulan II 2023 sebesar USD7,37 miliar namun meningkat dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun 2022 sebesar USD1,30 miliar.

APBN memperlihatkan kinerja yang kuat. Memasuki akhir tahun 2023, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah mencatatkan kinerja positif. Hingga 12 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Hibah tercatat sebesar Rp2.553,15 triliun atau mencapai 99,73 persen dari target pada Perpres 75/2023. Capaian tersebut lebih tinggi Rp101,33 triliun dari periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.588,2 triliun (terserap 83,0 persen dari pagu Perpres 75/2023). realisasi belanja negara tersebut didukung oleh tingginya realisasi belanja modal. Di sisi lain, pembiayaan anggaran menurun seiring meningkatnya pendapatan negara. Penurunan defisit tersebut dipengaruhi meningkatnya pendapatan negara yang didorong oleh kenaikan harga komoditas serta optimalisasi belanja negara. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akselerasi belanja dan mengantisipasi perlambatan pendapatan, untuk menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta ketidakpastian ekonomi global. APBN sebagai instrumen fiskal senantiasa dijaga agar tetap

efektif menjalankan peran sebagai *shock absorber* melalui berbagai kebijakan dan alokasi APBN untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mengalokasikan belanja prioritas untuk penguatan produktivitas dan fondasi ekonomi nasional.

TEKF edisi ini mengulas dua topik khusus yaitu "Gejolak Pasar Keuangan Global dan Efeknya terhadap Sektor Keuangan Indonesia" dan "Perekonomian Tiongkok di Tengah Pusaran Geofragmentasi Dunia". Pada ulasan yang pertama membahas tentang kondisi sektor keuangan global dimana hampir selama satu setengah tahun terakhir perekonomian global diwarnai kebijakan moneter ketat, ditandai dengan kenaikan suku bunga acuan (policy rate) yang relatif tinggi. Awal mula tren kenaikan suku bunga tersebut terutama dipicu oleh peningkatan laju inflasi yang tinggi di berbagai negara sebagai akibat dari pandemi. Sementara itu, pada ulasan yang kedua membahas perekonomian Tiongkok dimana selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah mengalami metamorfosis ekonomi dari sebuah perekonomian yang direncanakan secara terpusat (*centrally-planned*) menjadi perekonomian berorientasi pasar *(market-based)* yang besar dan dinamis. Evolusi ini tidak hanya mendorong Tiongkok untuk menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia tetapi juga turut merekonfigurasi lanskap perekonomian global.

BAGIAN I

PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI

IN
CRETA

Perkembangan Perekonomian Global

Perekonomian global masih dihadapkan pada tingginya risiko dan ketidakpastian

Situasi perekonomian masih penuh tantangan, dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung lemah dan risiko yang semakin meningkat. Inflasi global melanjutkan tren penurunan, namun masih berada di atas target bank sentral negara maju. Hal ini mengindikasikan masih akan berlanjutnya strategi kebijakan moneter *high for longer*. Di sisi lain, peningkatan tensi geopolitik di berbagai belahan dunia mendorong fragmentasi ekonomi yang meningkatkan disrupsi rantai pasok global, membatasi arus perdagangan dan investasi, serta menurunkan prospek pertumbuhan.

Menjelang penutupan tahun 2023, harga komoditas di pasar internasional mencatatkan pertumbuhan yang relatif lebih lambat dibandingkan tahun 2022. Pada komoditas energi, tekanan kenaikan harga minyak sedikit mereda setelah sempat mengalami kenaikan akibat perang di Timur Tengah. Harga gas alam juga terus mengalami penurunan seiring dengan perbaikan *supply* sementara permintaan global masih lemah. Per 8 Desember, harga minyak turun sebesar -11,7 persen (ytd) sedangkan harga gas alam telah turun sebesar -37,2 persen (ytd). Sementara itu, tren peningkatan mulai terlihat pada harga batu bara sejak awal November, menjelang musim dingin di negara-negara di belahan bumi Utara. Pada komoditas pangan seperti gandum, beras, dan kedelasi, fluktuasi harga sebagian besar dipicu oleh faktor anomali cuaca yang menyebabkan gagal panen. Di sisi lain, harga *Crude Palm Oil* (CPO) mengalami penurunan karena lemahnya permintaan global.

GRAFIK 1

Pergerakan harga komoditas global

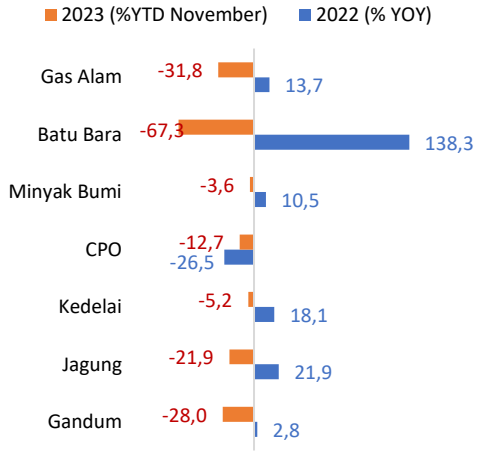

Sumber: Bloomberg, diolah

Aktivitas manufaktur global masih terkontraksi. PMI Manufaktur global pada bulan November berada di zona kontraksi di level 49,3. Sebanyak 69,6 persen dari negara G20 (kecuali Saudi dan Argentina) mengalami kontraksi, termasuk di antaranya AS (49,4), negara-negara di Eropa (44,2), dan Jepang (48,3). Sementara itu, hanya 30,4 persen negara yang mengalami ekspansi, termasuk di antaranya Indonesia (51,7), India (56,0) dan Tiongkok (50,7). Dalam hal kinerja manufaktur, India masih menjadi *best performer* meskipun pertumbuhan perdagangannya melambat, sedangkan Brasil dan Eropa menjadi *worst performer* seiring dengan penurunan permintaan ekspor. Di kawasan Eropa, penurunan terdalam pada aktivitas manufaktur dialami oleh Austria, Jerman, dan Prancis.

GRAFIK 2

PMI manufaktur negara-negara G20

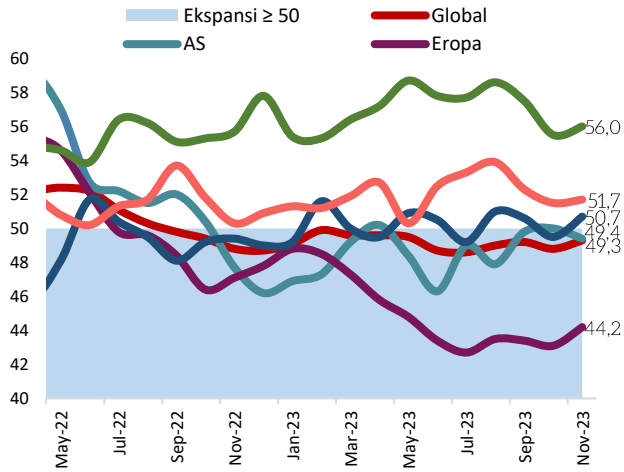

Sumber: Bloomberg, 5 Desember 2023

Angka inflasi di beberapa negara melanjutkan tren yang melandai dan telah melewati level tertinggi di tahun 2022. Pada Oktober, inflasi AS turun ke 3,2 persen (yoy), lebih rendah setengahnya dari angka 7,7 persen (yoy) yang terjadi di Oktober 2022. Senada dengan AS, inflasi Uni Eropa juga semakin mereda dengan angka November 2023 yang tercatat 2,4 persen (yoy), merupakan angka terendah sejak Juli 2021. Bergeser pada kelompok negara berkembang, angka inflasi November yang rendah juga dialami Indonesia yaitu sebesar 2,9 persen, Meksiko di level 4,3 persen, bahkan Tiongkok mengalami deflasi sebesar 0,5 persen (yoy). Tren inflasi yang rendah di sejumlah negara diakibatkan turunnya harga beberapa komoditas global, baik energi maupun pangan yang secara ytd tumbuh negatif. Perkembangan tersebut dipengaruhi *supply* yang membaik sementara permintaan masih terbatas baik dari AS, Tiongkok, maupun India. Turunnya inflasi November di sejumlah negara kontras dengan yang dialami oleh Turki yang justru mencatatkan peningkatan inflasi ke level 62 persen dipicu kenaikan harga secara umum, terutama pada perumahan dan biaya komunikasi.

GRAFIK 3

Inflasi di beberapa negara

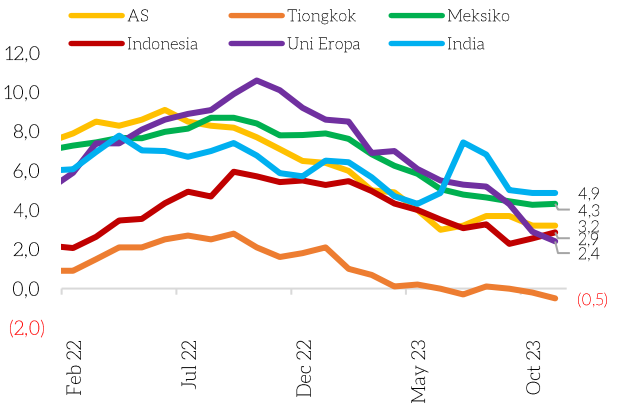

Sumber: Bloomberg, diolah

Kebijakan pengetatan moneter berlanjut merespons tekanan inflasi yang masih tinggi. Tren inflasi yang melandai tidak serta merta mendorong pelonggaran kebijakan moneter global secara simultan. Beberapa bank sentral memutuskan masih mempertimbangkan perkembangan penurunan inflasi secara berkelanjutan sebelum melakukan pelonggaran kebijakan moneter. AS masih menahan suku bunga acuan pada level 5,50 persen di bulan November, begitu pula Uni Eropa dan Inggris dengan suku bunga acuan masing-masing yang masih ditahan pada tingkat 4,50 persen dan 5,25 persen. Sementara itu, suku bunga di negara berkembang seperti Indonesia berada di tingkat 6,00 persen, Meksiko di 11,25 persen, India di 6,50 persen dan Tiongkok sebesar 3,45 persen. Seperti halnya bank sentral negara maju, bank sentral di negara berkembang juga masih terus memantau kondisi inflasi secara berkelanjutan sehingga memerlukan waktu untuk memangkas suku bunga lebih lanjut. Oleh sebab itu, meskipun inflasi tengah melandai, suku bunga global diperkirakan masih akan berada di level yang tinggi dalam beberapa waktu ke depan (*high for longer*).

GRAFIK 4

Suku bunga di beberapa negara (%yoy)

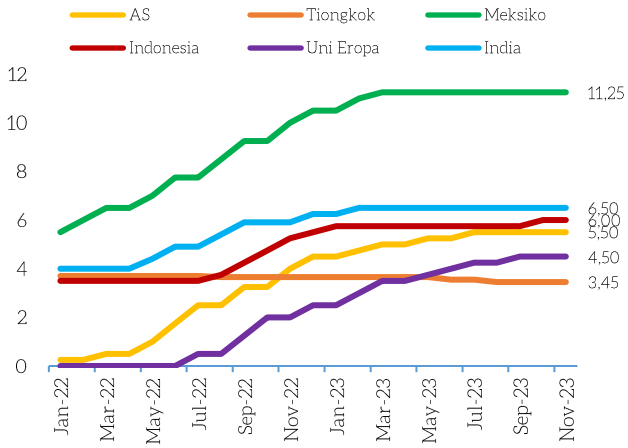

Sumber: Bloomberg, diolah

Secara umum, pertumbuhan ekonomi global pada triwulan III tahun 2023 masih lemah, dengan divergensi antarwilayah yang semakin melebar. AS misalnya, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, sementara Eropa menghadapi tantangan serius dengan kontraksi ekonomi di beberapa negara utama. Asia masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi global, dengan perkonomian India, Filipina, Vietnam, dan Indonesia yang tumbuh kuat. Tiongkok yang mengalami perlambatan pertumbuhan pasca pandemi juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih kuat dari ekspektasi pasar.

Perekonomian AS menunjukkan kinerja yang resilien pada triwulan III tahun 2023 di tengah pengetatan moneter. Produk domestik bruto (PDB) AS tumbuh mencapai 3,0 persen (yoy), didorong oleh faktor kunci seperti kenaikan pengeluaran konsumen, investasi swasta, dan lonjakan signifikan dalam ekspor. Pengeluaran konsumen, yang berkontribusi sebesar hampir 70

GRAFIK 5

Pertumbuhan ekonomi triwulan III negara ASEAN & G20 (% yoy)

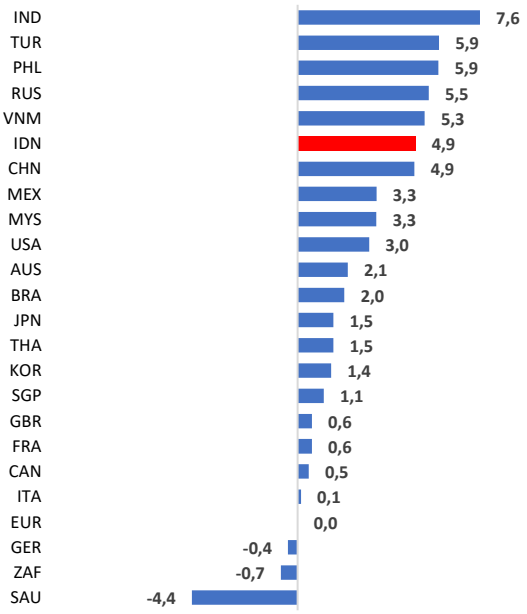

Sumber: Bloomberg, diolah

persen dari total perekonomian AS, tercatat meningkat 3,6 persen (yoy). Di sisi lain, ekspor memberikan kontribusi yang kuat dengan pertumbuhan sebesar 6 persen, sementara impor tumbuh 5,2 persen. Investasi nonresidensial melonjak di luar ekspektasi sebesar 1,3 persen. Selain itu, sektor investasi perumahan juga memberikan kontribusi besar dengan mencatat pertumbuhan sebesar 6,2 persen. Hal ini menandai pertumbuhan positif pertama dalam hampir dua tahun, menunjukkan pemulihan yang kuat di pasar perumahan. Belanja pemerintah yang melonjak sebesar 5,5 persen menunjukkan

GRAFIK 6

Pertumbuhan ekonomi AS (% yoy)

Sumber: Bloomberg, diolah

komitmen Pemerintah AS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, tantangan serius masih menerpa perekonomian Eropa. Produk Domestik Bruto (PDB) di Uni Eropa mengalami stagnasi pada triwulan III 2023. Beberapa negara seperti Portugal mencatat pertumbuhan yang signifikan sebesar 1,9 persen (yoy), demikian pula Spanyol sebesar 1,8 persen (yoy), Belgia sebesar 1,4 persen (yoy), Prancis sebesar 0,6 persen (yoy), dan Italia sebesar 0,14 persen (yoy). Di sisi lain, Jerman mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebesar -0,4 persen (yoy). Negara-negara seperti Austria, Irlandia, dan Estonia juga mengalami kontraksi ekonomi yang menambah kompleksitas situasi perekonomian global.

GRAFIK 7

Pertumbuhan ekonomi Eropa (% yoy)

Sumber: Bloomberg, diolah

Perekonomian Jerman, sebagai salah satu dengan negara ekonomi terbesar di Eropa, tercatat mengalami kontraksi pada kuartal III 2023. Penurunan ini dipicu oleh rendahnya belanja konsumen, meskipun investasi perusahaan pada mesin dan peralatan memberikan kontribusi positif terhadap PDB Jerman. Tantangan semakin diperparah oleh kondisi ekonomi zona Euro secara keseluruhan, yang terkendala oleh tingginya tingkat inflasi, suku bunga yang mencapai rekor tertinggi, dan perlambatan kebijakan fiskal.

Tiongkok mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan III 2023 yang lebih kuat dari diperkirakan. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 4,9 persen (yoy), di atas ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan di level 4,6 persen. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan perlambatan dari kuartal sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 6,3 persen.

GRAFIK 8

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok (% yoy)

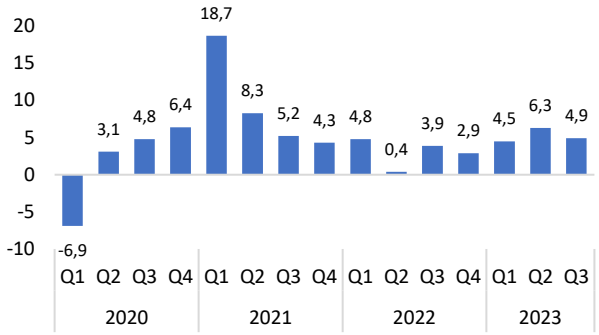

Sumber: Bloomberg, diolah

Perekonomian India tumbuh kuat. Pada triwulan III 2023, pertumbuhan ekonomi India mencapai 7,6 persen (yoy). Meskipun mengalami perlambatan dari kuartal kedua yang tumbuh sebesar 7,8 persen (yoy), pertumbuhan kuartal ketiga 2023 jauh melampaui perkiraan pasar yang sebesar 6,8 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, belanja swasta tetap tumbuh 3 persen (yoy) pada triwulan III tahun 2023, meskipun sedikit melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6 persen. Perlambatan tersebut sejalan dengan aktivitas domestik yang masih dalam tahap pemulihan serta inflasi yang masih cenderung tinggi pada kuartal ketiga. Belanja pemerintah juga turut mendorong perekonomian India di triwulan III, dengan peningkatan yang cukup tajam sebesar 12 persen (yoy), jauh meningkat dari kuartal sebelumnya yang tercatat -0,7 persen (yoy). Belanja infrastruktur yang tinggi, baik oleh pemerintah pusat maupun negara bagian, juga turut mendorong pembentukan modal bruto yang tumbuh 11 persen (yoy). Ekspor dan impor India juga terpantau tumbuh masing masing 4,3 persen (yoy) dan 16,7 persen (yoy).

GRAFIK 9

Pertumbuhan ekonomi India (% yoy)

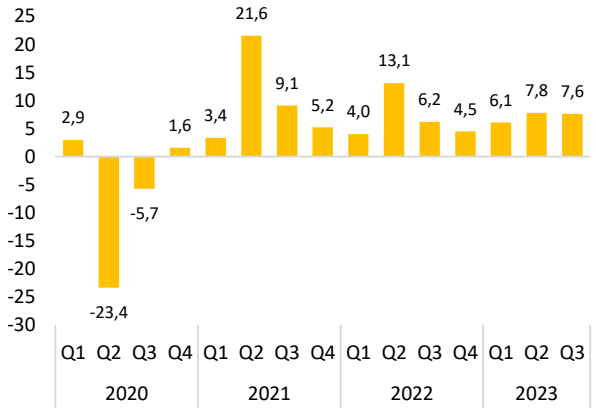

Sumber: Bloomberg, diolah

Outlook dan risiko ekonomi global

Pada triwulan akhir tahun 2023, prospek perekonomian global masih lemah, dengan pemulihan yang tidak merata. Dalam laporan *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis pada bulan Oktober, IMF memproyeksikan perekonomian global tahun 2023 tumbuh melemah dari 3,5 persen di 2022 menjadi 3,0 persen (tidak berubah dari proyeksi Juli) dan melanjutkan pelemahan ke 2,9 persen di 2024 (turun 0,1 poin persentase dari proyeksi Juli). Divergensi pemulihan ekonomi juga semakin lebar, di mana perekonomian AS menunjukkan tren pemulihan yang menguat, sementara kawasan lain seperti kawasan Eropa dan Tiongkok mengalami tren pemulihan yang lemah dan di bawah ekspektasi pasar.

Kondisi inflasi global menuju penghujung tahun 2023 kian melandai namun masih berada di atas target inflasi negara maju di kisaran 2 persen. IMF memproyeksikan inflasi global akan turun ke 6,8 persen tahun ini (tidak berubah dari proyeksi Juli) dan melanjutkan penurunan ke 5,7 persen di 2024 (naik 0,5 poin persentase dari proyeksi Juli). Proyeksi ini mengindikasikan bahwa inflasi belum akan menyentuh target sampai setidaknya tahun 2025. Pengendalian inflasi global juga masih dibayangi oleh kondisi pasar tenaga kerja yang masih ketat (terutama di AS), serta fluktuasi harga komoditas yang dipengaruhi oleh tensi geopolitik dan juga dampak perubahan iklim.

Angka proyeksi inflasi IMF juga mengindikasikan bahwa perekonomian global masih akan berada pada situasi *high for longer*. Pada pertemuan The Federal Open Market Committee (FOMC) bulan November, the Fed kembali menahan suku bunganya di tingkat 5,25 – 5,50 persen. Bertahannya tingkat suku bunga sejak 5 bulan sebelumnya mendorong spekulasi pasar atas berakhirnya siklus pengetatan moneter the Fed. Meskipun demikian, kondisi ekonomi, pasar tenaga kerja AS, serta tingkat inflasi bulan Oktober yang masih berada di 3,2

persen menjadi faktor pendorong berlanjutnya pengetatan moneter di AS. Berdasarkan *dot plot* yang dirilis pada bulan September, the Fed memperkirakan tingkat suku bunga dapat mencapai 5,75 persen sampai dengan akhir tahun ini. Sejalan dengan AS, *European Central Bank* dan *Bank of England* masih mempertahankan tingkat suku bunga acuannya masing-masing di tingkat 4,50 persen dan 5,25 persen pada pertemuan terakhir.

Perkonomian global menunjukkan kondisi yang beragam. Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan kuat, sementara Eropa menghadapi tantangan serius dengan kontraksi ekonomi di beberapa negara utama. Asia masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi global, dengan Tiongkok yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi meskipun kinerja ekonominya melambat dibandingkan prapandemi. Di samping itu, India juga menunjukkan ketangguhan dalam sektor-sektor kunci, di tengah permintaan global yang melambat.

Perekonomian AS diproyeksikan cukup resilien tahun ini namun berpotensi mengalami *hard landing* di tahun 2024. Pertumbuhan tahun 2023 diperkirakan sama dengan tahun lalu (2,1 persen), setelah itu akan melambat ke 1,5 persen di tahun 2024. Resiliensi perekonomian AS, sebagaimana ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terus menguat sampai dengan triwulan III 2023,

TABEL 1

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Negara-negara Utama (dalam %)

Negara	2022	2023F	2024F	2023 Change from July WEO	2024 Change from July WEO
Global	**3,5**	**3,0**	**2,9**	**0**	**-0,1**
Eropa	3,3	0,7	1,2	-0,2	-0,3
AS	2,1	2,1	1,5	0,3	0,5
Tiongkok	3,0	5,0	4,2	-0,2	-0,3
India	7,2	6,3	6,3	0,2	0
ASEAN-5					
Indonesia	5,3	5,0*	5,2*	0	0
Malaysia	8,7	4,0	4,3	-0,5	-0,2
Filipina	7,6	5,3	5,9	-0,9	0,4
Thailand	2,6	2,7	3,2	-0,3	0,4
Singapura	3,6	1,0	2,1	n/a	n/a

Sumber: WEO IMF Oktober 2023 dan Kemenkeu RI

mendorong revisi ke atas terhadap proyeksi pertumbuhan tahun 2023. Namun demikian, seiring dengan berkurangnya akumulasi tabungan penduduk AS selama pandemi, berakhirnya stimulus fiskal, serta dampak pengetatan suku bunga, permintaan dan penyaluran kredit pada periode mendatang diperkirakan akan mulai mengalami tekanan. Tekanan fiskal yang dialami oleh AS saat ini juga berpotensi mendorong Pemerintah AS untuk mengendalikan belanja, termasuk subsidi, sehingga akan turut menjadi faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi AS ke depannya.

Perekonomian Eropa diperkirakan masih penuh tantangan di tahun ini, pemulihan diperkirakan baru terjadi di 2024. IMF memproyeksikan Zona Eropa hanya akan tumbuh tipis di tingkat 0,7 persen pada tahun 2023 dan akan membaik di tahun 2024 dengan pertumbuhan 1,2 persen. Kombinasi tingkat suku bunga dan inflasi yang tinggi sampai dengan triwulan III 2023 mendorong lemahnya aktivitas ekonomi di tahun ini. Kenaikan tingkat upah yang tidak dapat mengimbangi laju inflasi memicu lemahnya permintaan dan konsumsi masyarakat. Belanja pemerintah juga cenderung selektif di tengah pendapatan perpajakan yang terbatas dan tingkat suku bunga tinggi, sementara kebutuhan kebijakan untuk pengendalian inflasi masih tinggi. Di sisi lain, lemahnya kondisi global turut menekan permintaan terhadap komoditas ekspor Eropa. Namun demikian, berlanjutnya penurunan inflasi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Eropa pada tahun 2024.

Perekonomian di kawasan Asia diperkirakan masih akan menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi global di 2023 dan 2024, meskipun dibayangi oleh pelemahan ekonomi Tiongkok. India diproyeksikan menjadi perekonomian dengan pertumbuhan terkuat di Asia (6,3 persen pada 2023 dan 2024), didorong oleh kemampuannya dalam memanfaatkan peluang relokasi industri. Sementara itu, negara-negara ASEAN-5 kecuali Indonesia mengalami revisi ke bawah untuk pertumbuhan tahun 2023, terutama sebagai dampak penurunan ekspor akibat lemahnya permintaan global serta pemulihan ekonomi Tiongkok yang di bawah ekspektasi. Namun demikian, prospek pertumbuhan ASEAN-5 diperkirakan akan membaik di tahun 2024. Sektor jasa dinilai menjadi area yang masih

potensial untuk dieksplorasi oleh negara-negara berkembang, mengingat pertumbuhan kelas menengah serta perkembangan digitalisasi diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor jasa serta meningkatkan prospek pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Menjelang akhir tahun 2023, ketidakpastian ekonomi global masih meningkat dengan timbangan risiko yang mengarah ke negatif. Lingkungan suku bunga tinggi yang masih akan berlanjut berpotensi meningkatkan volatilitas sektor keuangan di negara berkembang dan *emerging market*, terutama karena *capital outflow* dan depresiasi mata uang. Suku bunga tinggi juga meningkatkan biaya pinjaman yang selanjutnya berpotensi menghambat investasi sektor swasta. Dari sisi fiskal, suku bunga tinggi juga meningkatkan biaya utang pemerintah dan membatasi ruang fiskal pemerintah untuk mengintervensi perekonomian.

Situasi perekonomian yang menantang di negara-negara utama seperti AS dan Tiongkok juga turut memperburuk *downside risks*. Masyarakat AS akan memiliki *excess saving* yang lebih rendah sehingga meningkatkan eksposur terhadap tingkat suku bunga yang tinggi. Pemerintah AS saat ini menghadapi tekanan fiskal akibat beban utang yang meningkat serta isu di parlemen. AS juga menghadapi kemungkinan *hard landing* seiring dengan dampak pengetatan moneter. Di sisi lain, Tiongkok, mengalami moderasi prospek pertumbuhan karena faktor struktural (lemahnya konsumsi, investasi, dan peningkatan *aging population)* serta isu di sektor properti.

Selain faktor ekonomi, faktor seperti dampak perubahan iklim dan peningkatan tensi geopolitik turut mempengaruhi prospek perekonomian global. Perubahan iklim dapat meningkatkan potensi bencana karena cuaca ekstrem serta meningkatkan volatilitas harga komoditas pangan yang dapat memicu kenaikan inflasi. Selain itu, geopolitik juga menjadi sumber ketidakpastian yang risikonya tertransmisi ke ekonomi melalui jalur perdagangan, pasar keuangan, juga harga komoditas. Dari jalur perdagangan, persaingan geopolitik memicu meluasnya 'perang dagang', ditandai dengan peningkatkan restriksi perdagangan dan kebijakan industrial di berbagai negara, yang dapat meningkatkan efisiensi serta menurunkan volume perdagangan global. Pergeseran kekuatan global juga mendorong fenomena dedolarisasi. Beberapa komunitas internasional mulai mendiskusikan mata uang sebagai alternatif Dolar AS di samping mengemukanya gerakan untuk menggalakkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara (contoh: ASEAN *Local Currency Transaction Framework*). Dari jalur keuangan, peningkatan tensi geopolitik dapat meningkatkan sentimen negatif dan memicu *market jitters* yang dapat meningkatkan volatilitas sektor keuangan. Dari aspek harga komoditas, perang dapat meningkatkan disrupsi rantai pasok pada gilirannya menghambat proses produksi dan usaha untuk pengendalian inflasi global.

Perkembangan Ekonomi Domestik

Kinerja perekonomian Indonesia terjaga di tengah perlambatan perekonomian global

Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif terjaga di tengah meningkatnya risiko dan perlambatan ekonomi global. PDB triwulan III 2023 tumbuh positif sebesar 4,94 persen (yoy). Meskipun melambat dibandingkan periode sebelumnya, Indonesia termasuk salah satu negara dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah tantangan global. Hal ini ditopang oleh APBN yang bekerja dengan baik dalam fungsinya sebagai stabilisator dan *shock absorber* untuk melindungi masyarakat. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya permintaan global sehingga mengakibatkan penurunan kinerja ekspor, sedangkan permintaan domestik masih cukup kuat sebagaimana tercermin pada konsumsi masyarakat dan investasi. Sampai dengan triwulan III 2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh sebesar 5,05 persen (yoy). Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

GRAFIK 10

Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)

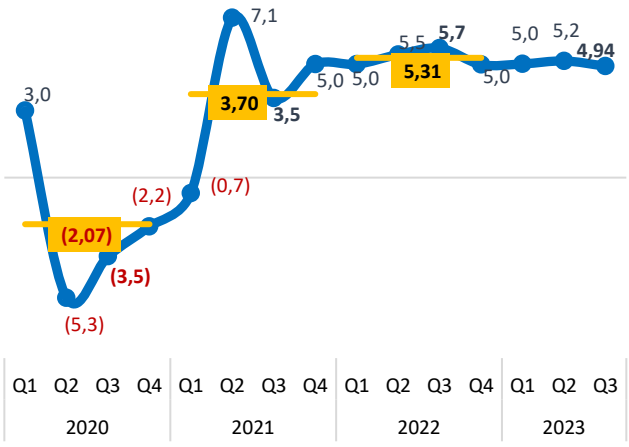

Sumber: BPS, diolah

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi didukung oleh sektor konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh positif

Perekonomian Indonesia tumbuh kuat didukung oleh permintaan domestik, sejalan dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama pertumbuhan triwulan III 2023, tumbuh 5,06 persen (yoy). Perkembangan ini sejalan dengan beberapa indikator konsumsi, termasuk rata-rata Indeks Penjualan Riil yang tumbuh 1,25 persen (yoy) pada triwulan III 2023. Pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat melalui APBN dengan berbagai kebijakan yang terus dioptimalkan, di antaranya pemberian bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penguatan distribusi dan akses masyarakat terhadap pasokan pangan, serta penguatan koordinasi pusat dan daerah melaui TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) untuk menjaga stabilitas harga. Keberhasilan upaya Pemerintah tersebut tercermin dalam laju konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif, menandakan bahwa keberlanjutan daya beli masyarakat terus terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali.

Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi. Pada triwulan III 2023, konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 3,8 persen (yoy). Pergeseran pembayaran gaji ke-13 yang dilakukan di triwulan II merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya pertumbuhan konsumsi Pemerintah pada triwulan ini. Adapun konsumsi Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong penguatan aktivitas perekonomian dan peningkatan pelayanan publik. Konsumsi Pemerintah yang terealisasi hingga saat ini diharapkan memiliki *multiplier effect* yang lebih tinggi terhadap perekonomian sehingga keberlangsungan transformasi ekonomi terus terjaga.

APBN mencatakan surplus dan diperkirakan akan mendorong pengeluaran konsumsi pemerintah. Hingga triwulan III, surplus tersebut mencapai Rp67,7 triliun dengan pendapatan dan belanja negara masing-masing tumbuh 3,1 persen dan 2,8 persen. Keseimbangan primer sepanjang tahun 2023 tercatat positif, menunjukkan

pembiayaan anggaran yang semakin *prudent* dan tetap produktif. Sementara, saldo kas yang *ample* mencerminkan perlunya akselerasi penyerapan belanja dan investasi di triwulan terakhir tahun 2023. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) pada triwulan IV diperkirakan tumbuh kuat, ditunjukkan dengan pola pertumbuhan triwulanan PKP baik nominal dan riil secara qtq yang dominan di triwulan II dan triwulan IV.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) / Investasi menunjukkan kinerja impresif. Pertumbuhan PMTB tercatat sebesar 5,8 persen (yoy) pada triwulan III 2023. Ekspansi aktivitas konstruksi mendorong kinerja PMTB bangunan yang tumbuh mencapai 6,3 persen (yoy) sejalan dengan penjualan semen domestik yang tumbuh 8,4 persen. Di periode yang sama, pertumbuhan belanja modal Pemerintah yang mencapai 32,4 persen (yoy) turut mendorong pertumbuhan barang modal bangunan. Konektivitas yang semakin maju didukung stabilnya perekonomian dalam negeri turut menjaga keyakinan pelaku usaha untuk berinvestasi. Sementara itu, kinerja pertumbuhan nonbangunan terjadi pada investasi kendaraan yang tumbuh mencapai 21,3 persen (yoy).

GRAFIK 11

Pertumbuhan PDB sisi pengeluaran (%, yoy)

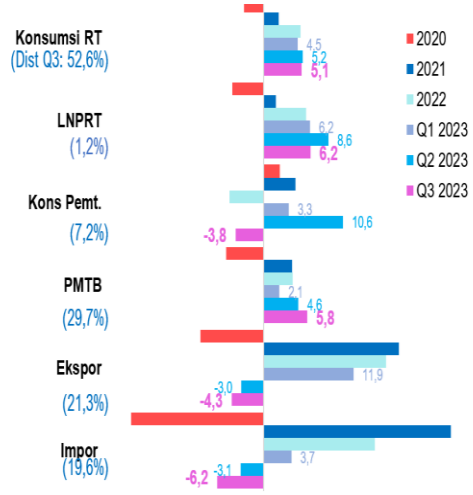

Sumber: BPS, diolah

Tren perlambatan ekonomi dunia menahan laju pertumbuhan ekspor dan impor nasional. Ekspor barang dan jasa terkontraksi sebesar 4,3 persen (yoy) akibat pelemahan permintaan global. Penurunan kinerja ekspor tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga terjadi di banyak negara akibat melemahnya aktivitas ekonomi dunia. Meskipun pertumbuhan ekspor Indonesia secara nilai termoderasi, namun volume ekspor produk hilirisasi seperti ekspor besi baja dan ekspor nikel tumbuh kuat. Keberlanjutan hilirisasi SDA diharapkan dapat semakin meningkatkan daya saing ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di dalam peta perdagangan internasional. Sementara itu, impor pada triwulan III 2023 juga terkontraksi sebesar 6,2 persen (yoy) terutama bersumber dari penurunan impor bahan baku/penolong.

Dari sisi produksi, kinerja ekonomi tumbuh positif mendorong perbaikan kondisi ketenagkerjaan

Dari sisi produksi, kinerja sektor-sektor unggulan tumbuh positif, termasuk sektor primer. Sektor pertanian tumbuh moderat sebesar 1,5 persen (yoy), salah satunya disebabkan oleh perubahan cuaca. Sementara, sektor pertambangan tumbuh kuat di triwulan III 2023 sebesar 7,0 persen (yoy) ditopang oleh subsektor pertambangan bijih logam yang tumbuh sebesar 17,8 persen (yoy). Pertumbuhan pertambangan bijih logam didorong oleh permintaan domestik untuk kebutuhan barang input industri logam dasar terutama olahan nikel.

Sektor manufaktur dan perdagangan masih menjadi kontributor utama dari sisi produksi. Sektor manufaktur tumbuh kuat sebesar 5,2 persen (yoy), ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan tingginya permintaan atas komoditas hilirisasi khususnya mineral. Industri elektronik serta logam dasar mampu tumbuh kuat, masing-masing 13,7 persen dan 10,9 persen pada triwulan III 2023. Sementara, industri alat angkutan dan barang galian nonlogam mampu tumbuh masing-masing sebesar 7,3 persen dan 7,2 persen, didorong oleh peningkatan permintaan domestik serta peningkatan produksi kendaraan bermotor dan permintaan semen domestik. Sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang kuat, sektor perdagangan juga mampu tumbuh cukup kuat yaitu 5,1 persen, terutama didorong oleh peningkatan penjualan kendaraan bermotor dan suku cadang.

Sektor penunjang pariwisata masih mampu tumbuh dua digit dan melanjutkan tren pertumbuhan kuat di triwulan III 2023. Sektor transportasi tercatat mampu tumbuh sebesar 14,7 persen (yoy), ditopang kuatnya pertumbuhan

transportasi udara dan pergudangan. Sejalan dengan pertumbuhan sektor transportasi, sektor akomodasi mampu tumbuh 10,9 persen, terutama didorong oleh pertumbuhan subsektor akomodasi sebesar 13,7 persen. Arus pariwisata mancanegara terus masuk dengan kuat ke dalam negeri. Rata-rata level kunjungan turis asing naik di triwulan III, mencapai rata-rata kunjungan 1,1 juta per bulan. Penyelenggaraan gelaran baik level nasional maupun internasional turut mendorong daya tarik indonesia sebagai destinasi wisata.

GRAFIK 12

Pertumbuhan PDB sisi sektoral (%, yoy)

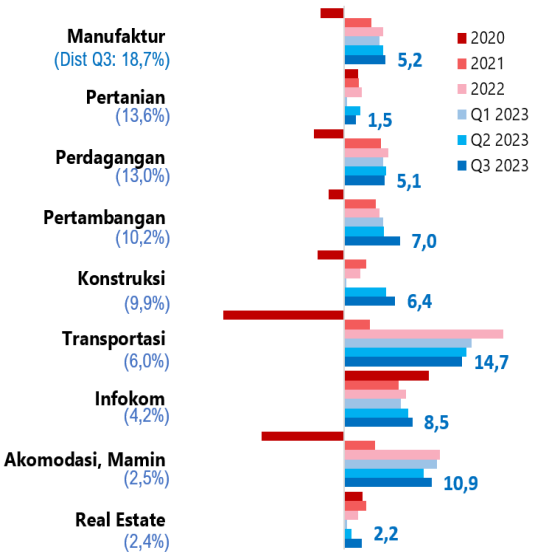

Sumber: BPS, diolah

Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua kawasan. Wilayah Jawa sebagai kontributor utama perekonomian mampu tumbuh sebesar 4,8 persen (yoy). Kinerja sektor manufaktur dan jasa menopang pertumbuhan ekonomi pada kawasan ini. Sementara, wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu masing-masing sebesar 6,4 persen dan 9,3 persen pada triwulan III 2023. Pengembangan hilirisasi mineral masih menjadi pendorong pertumbuhan kawasan ini.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga turut mendorong perbaikan kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten menurun hingga mencapai level 5,32 persen pada Agustus 2023 dari 5,86 persen pada Agustus 2022. Dalam kurun waktu Agustus 2022 s.d. Agustus 2023, pertumbuhan ekonomi menciptakan tambahan lapangan kerja sebanyak 4,55 juta orang. Perbaikan ekonomi juga diikuti dengan peningkatan porsi tenaga kerja formal menjadi sebesar 40,89 persen dari sebelumnya 40,69 persen per Agustus 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat menjadi sebesar 69,48 persen (TPAK Agustus 2022: 68,63 persen), merupakan level tertinggi sejak tahun 1986. TPAK pada perempuan tercatat terus meningkat lebih tinggi dibanding laki-laki, menandakan perbaikan peningkatan kesempatan kerja pada perempuan.

Dari sisi sektoral, penciptaan lapangan kerja hampir terjadi di seluruh sektor. Lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi sektor tertinggi dengan jumlah tenaga kerja terbanyak yang mencapai total pekerja sebanyak 61,03 persen. Sementara itu, Sektor Akomodasi & Makan Minum mengalami peningkatan pekerja tertinggi sebanyak 1,18 juta orang, diikuti Sektor Konstruksi sebesar 0,77 juta orang, dan Sektor Pertanian sebesar 0,75 juta orang. Selain itu, perbaikan kondisi ketenagakerjaan juga diikuti dengan kenaikan rata-rata upah per bulan secara umum.

Outlook jangka pendek

Prospek pertumbuhan ekonomi nasional tidak lepas dari dinamika dan prospek pertumbuhan global. Laju ekspansi perekonomian diperkirakan masih akan terus berlanjut dan berada pada kisaran 5,0 persen pada tahun 2023. Indikator perekonomian terkini masih menunjukkan konsistensi ekspansi perekonomian, investasi memasuki tren peningkatan seiring dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mulai diselesaikan, konsumsi swasta masih kuat sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih tinggi, PMI Manufaktur nasional yang masih ekspansif, serta tingkat inflasi yang terkendali.

Perekonomian domestik Indonesia dalam satu tahun ke depan diproyeksikan masih cukup kuat dan stabil. Hal ini didukung oleh kuatnya daya beli masyarakat dan percepatan reformasi struktural serta keberhasilan transformasi ekonomi. Konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar pembentukan PDB diperkirakan akan terus menjadi penggerak pertumbuhan perekonomian nasional. Penguatan pertumbuhan konsumsi erat kaitannya dengan terkendalinya tekanan inflasi dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Penyelenggaraan pemilu serentak

dan pilkada pada tahun 2024 akan mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Investasi diperkirakan akan meningkat terutama terkait sektor-sektor yang berbasis hilir, baik mineral maupun produk pertanian. Pembangunan berbagai kawasan industri baru juga terbukti berhasil menarik investor asing ke Indonesia. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah juga diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan dunia usaha Indonesia sehingga mendorong investasi lebih besar.

Pemerintah tetap mewaspadai risiko dampak perlambatan ekonomi global yang disertai volatilitas pasar keuangan. Koordinasi antar otoritas kebijakan dalam perekonomian diperlukan dalam mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional dengan bekerja sama dengan institusi dan pemangku kepentingan lainnya. Dorongan terhadap keberlanjutan tahapan hilirisasi akan terus dilakukan demi mendorong daya saing produk ekspor nasional.

Tren perlambatan global diperkirakan berlanjut, berpotensi menggeret pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Untuk menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi, Pemerintah melakukan intervensi berupa paket kebijakan di penghujung tahun. Kebijakan tersebut mencakup penebalan bansos untuk mitigasi dampak elnino, percepatan penyaluran program KUR di tengah peningkatan suku bunga, serta kebijakan penguatan sektor perumahan. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan terus memanfaatkan sebesar-sebesarnya berbagai forum kerja sama ekonomi internasional untuk memperluas pasar ekspor produk-produk nasional. Selain itu, pemerintah akan terus melanjutkan agenda reformasi struktural untuk terus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi.

Pertumbuhan ekonomi semakin inklusif, kualitas pembangunan modal manusia terus meningkat

Kondisi perekonomian yang terus membaik dan inklusif diikuti oleh perbaikan kondisi ketenagakerjaan pada Agustus 2023. Pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga mendorong penambahan lapangan kerja baru. Jumlah orang bekerja tercatat 139,85 juta orang, meningkat 4,55 juta orang dibandingkan Agustus 2022. Hal ini tercermin pula pada meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mencapai 69,48 persen, meningkat sebesar 0,85 poin persentase dibandingkan Agustus 2022. TPAK pada perempuan tercatat terus mengalami kenaikan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi angkatan kerja masih didominasi laki-laki, tetapi kesempatan kerja bagi perempuan semakin terbuka.

GRAFIK 13

Tingkat partisipasi angkatan kerja

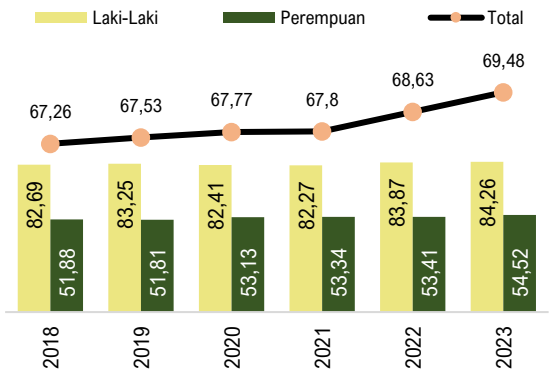

Sumber: BPS, diolah

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) konsisten berada pada tren menurun. TPT Agustus 2023 tercatat mencapai 5,32 persen, turun sebesar 0,54 poin persentase dari Agustus 2022 yang sebesar 5,86 persen. TPT laki-laki lebih besar daripada TPT perempuan, yaitu masing-masing sebesar 5,42

GRAFIK 14

Tingkat pengangguran terbuka

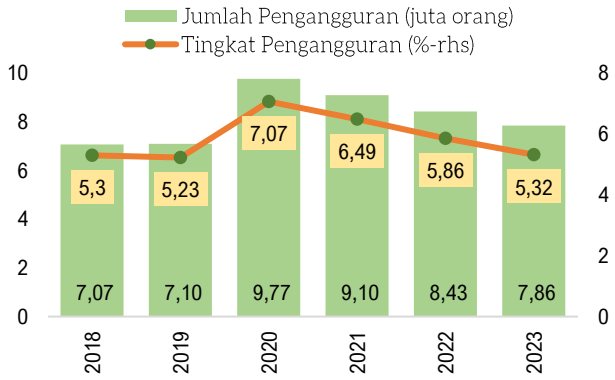

Sumber: BPS, diolah

persen dan 5,15 persen. Dibandingkan Agustus 2022, baik pada laki-laki maupun perempuan, TPT Agustus 2023 mengalami penurunan dengan penurunan pada kelompok perempuan (-0,60 poin persentase), lebih besar dibandingkan kelompok laki-laki (-0,51 poin persentase). Hal ini juga semakin memperkuat sinyal peningkatan kesempatan kerja pada perempuan yang lebih tinggi.

Secara spasial, perbaikan kondisi tenaga kerja merata hampir di seluruh wilayah. Meskipun secara nasional belum mencapai level prapandemi, namun TPT di tingkat perdesaan sudah mampu kembali ke level prapandemi, yaitu menjadi sebesar 3,88 persen per Agustus 2023 dari 3,92 persen per Agustus 2019. TPT menurun di sebagian besar provinsi kecuali Maluku Utara dan Papua Barat. Provinsi dengan TPT tertinggi adalah Provinsi Banten, yaitu sebesar 7,52 persen dan terendah di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 2,27 persen.

Dari sisi sektoral, penciptaan lapangan kerja terjadi di hampir seluruh sektor. Lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi sektor tertinggi dari sisi kontribusi terhadap perekonomian dengan jumlah tenaga kerja terbanyak, mencapai 61,03 persen dari total. Sementara itu, Sektor Akomodasi dan Makan Minum mengalami peningkatan pekerja tertinggi sebanyak 1,18 juta orang, diikuti Sektor Konstruksi

GRAFIK 15

Tingkat pengangguran terbuka secara spasial (%)

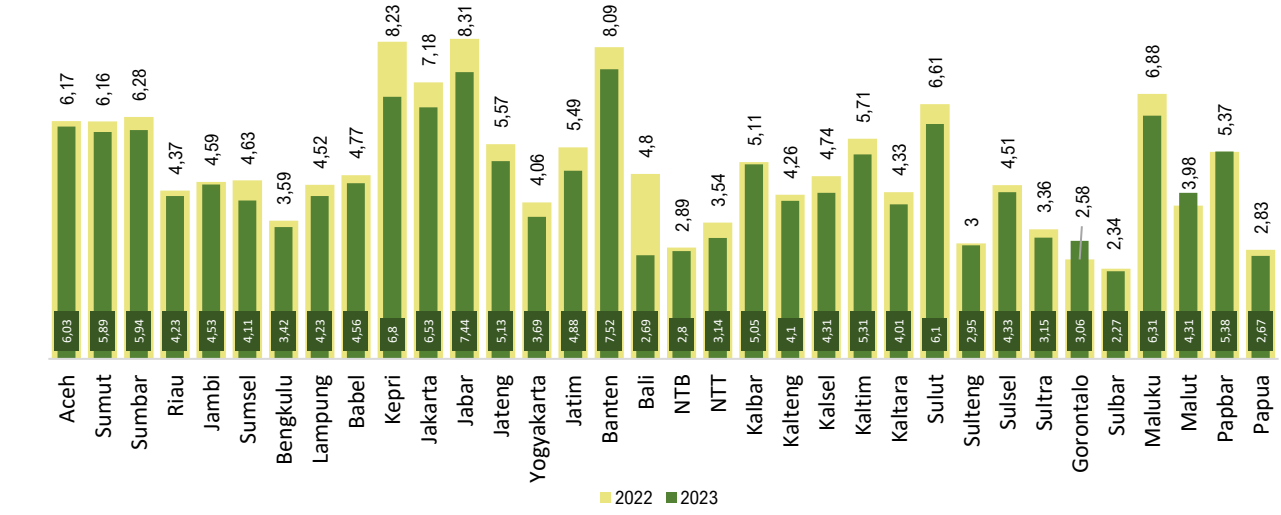

Sumber: BPS, diolah

GRAFIK 16

Penyerapan tenaga kerja (ribu orang; Ags 2022 – Ags 2023)

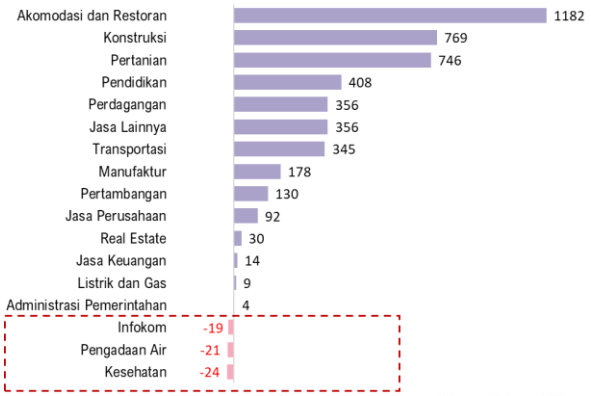

Sumber: BPS, diolah

GRAFIK 17

Persentase tenaga kerja per sektor terhadap total tenaga kerja

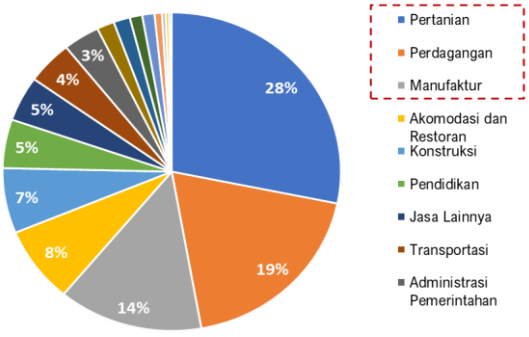

Sumber: BPS, diolah

sebesar 0,77 juta orang, dan Sektor Pertanian sebesar 0,75 juta orang. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan juga diikuti dengan meningkatnya persentase tenaga kerja pada sektor formal, dipengaruhi meningkatnya aktivitas sektor formal yang secara langsung menyerap pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Selain itu, rata-rata upah per bulan secara umum juga mengalami kenaikan.

Nilai Tukar Petani (NTP) terus mencatatkan surplus dan peningkatan hingga November 2023. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP nasional pada November 2023 sebesar 116,73 atau naik 0,82 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini dipengaruhi Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang naik sebesar 1,42 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang sebesar 0,59 persen. Berdasarkan subsektor, peningkatan NTP terutama terjadi pada NTP subsektor Hortikultura dan Perkebunan. El Nino telah berdampak signifikan pada penurunan produksi hortikultura domestik, sehingga menyebabkan harga di tingkat petani (It) mengalami kenaikan. Secara rata-rata, NTP selama tahun berjalan (Januari – November 2023) tercatat sebesar 111,97, lebih tinggi dari rata-rata NTP sepanjang tahun 2022 yang sebesar 107,33. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas NTP untuk mendorong kesejahteraan petani karena sebanyak hampir 30 persen pekerja berada di sektor pertanian.

GRAFIK 18

Perkembangan NTP dan subsektornya

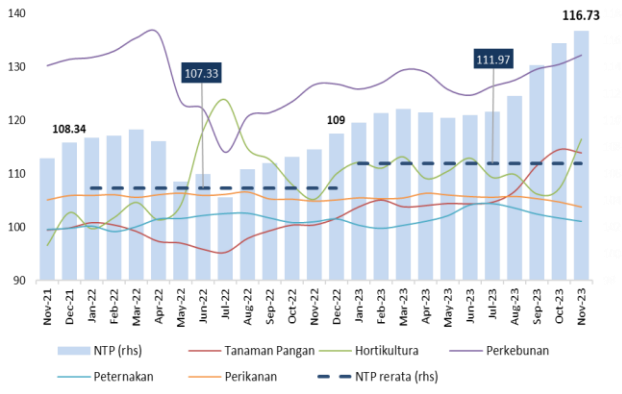

Sumber: BPS, diolah

Pembangunan nasional mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 2023. IPM tahun 2023 tercatat di 74,39, tumbuh 0,84 persen dari IPM di 2022. Angka pertumbuhan IPM ini bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan pada dua tahun sebelumnya. Secara spasial, peningkatan IPM terjadi di seluruh provinsi. Terdapat 2 provinsi dengan status pembangunan manusia "sangat tinggi" (IPM ≥ 80), 28 provinsi dengan status "tinggi" (70 ≤ IPM < 80), dan 4 provinsi dengan status "sedang" (60 ≤ IPM < 70).

GRAFIK 19

Perkembangan IPM nasional

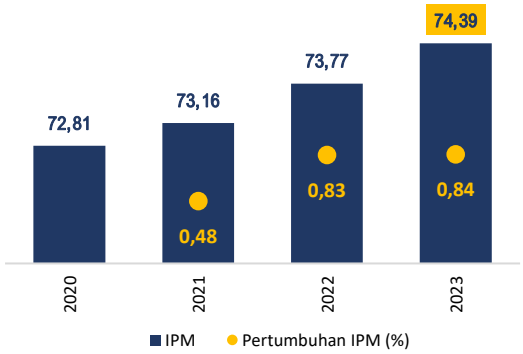

Sumber: BPS, diolah

Peningkatan IPM di 2023 didorong oleh peningkatan pada seluruh dimensi perhitungan IPM. Pertama, dimensi kesehatan yang mengacu pada indikator angka Umur Harapan Hidup di tahun 2023 meningkat sebesar 0,31 persen menjadi 73,93 tahun. Kedua, dimensi pendidikan dengan mengacu pada indikator Harapan Lama Sekolah tumbuh 0,38 persen menjadi 13,15 tahun dan indikator Rata-Rata Lama Sekolah tumbuh 0,92 persen menjadi 8,77 tahun. Ketiga, dimensi standar hidup layak mengacu pada indikator Pengeluaran per Kapita disesuaikan meningkat menjadi Rp11,9 juta per tahun atau tumbuh sebesar 3,66 persen.

Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai skema respons kebijakan telah disusun oleh Pemerintah untuk akselerasi transformasi ekonomi. APBN tetap menjadi instrumen fiskal yang membantu memberikan dorongan stimulus yang kuat, termasuk untuk mengantisipasi risiko dan ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian saat ini. Pemerintah juga telah

menetapkan anggaran prioritas untuk berbagai bidang di tahun 2024, antara lain anggaran untuk pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan, termasuk untuk mendukung berbagai agenda pembangunan di tahun 2024 seperti penurunan angka *stunting*. Di sisi lain, upaya penciptaan lapangan kerja terus dilakukan, antara lain melalui pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi serta penguatan *link & match* dengan pasar kerja melalui vokasi dan sertifikasi.

Inflasi masih terkendali namun peningkatan permintaan menjelang akhir tahun perlu diwaspadai

Inflasi terkendali dan masih berada dalam sasaran inflasi. Tingkat inflasi pada bulan November 2023 tercatat sebesar 2,86 persen (yoy). Meskipun pergerakan tren inflasi menunjukkan peningkatan sejak bulan September, peningkatannya masih lebih rendah dari tingkat inflasi di bulan Agustus yang sebesar 3,27 persen (yoy). Meskipun angka inflasi tersebut masih berada dalam sasaran inflasi, peningkatan permintaan menjelang libur panjang di akhir tahun tetap perlu terus diwaspadai sebagai sumber risiko. Berdasarkan data historis, peningkatan inflasi secara musiman selalu menimbulkan pergolakan harga.

Inflasi inti dan *administered price* (AP) menunjukkan tren perlambatan. Inflasi inti mengalami perlambatan sejak awal tahun, tercatat di level 1,87 persen (yoy) pada bulan November 2023. Penurunan terjadi pada inflasi inti untuk barang, sedangkan inflasi untuk jasa masih relatif stabil. Sementara itu, inflasi AP yang turun tajam sejak bulan September dipengaruhi oleh berakhirnya *base effect* penyesuaian harga BBM pada tahun sebelumnya. Pada bulan November 2023, inflasi AP mencapai 2,07 persen (yoy), turun drastis dari angka pada bulan Agustus 2023 yang mencapai 8,05 persen (yoy). Namun demikian, terdapat risiko tekanan harga akibat naiknya tarif angkutan udara menjelang libur natal dan tahun baru yang disebabkan tingginya harga avtur dan masih terbatasnya penerbangan.

Inflasi *volatile food* (VF) meningkat tajam. kenaikan tercatat hingga 7,59 persen (yoy) dibandingkan bulan Agustus yang masih berada di level 2,42 persen (yoy). Tren peningkatan inflasi komponen ini didorong oleh peningkatan harga pangan terutama beras dan komoditas hortikultura akibat fenomena El Nino. Perubahan musim tanam serta gangguan cuaca menyebabkan penurunan produksi hortikultura dan turut memengaruhi kenaikan inflasi VF dalam tiga bulan terakhir. Harga beras rata-rata bulan November mencapai Rp14.377, berada di atas harga eceran tertinggi sekaligus menjadi level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan harga beras tersebut sudah mulai melambat didukung oleh kebijakan stabilisasi pasokan dan intervensi harga. Stabilisasi pasokan dilakukan antara lain melalui impor beras di tengah restriksi impor oleh berbagai produsen global. Pemerintah juga mengoptimasi peran *shock absorber* dengan memperpanjang penyaluran bantuan pangan dari September sampai bulan Desember untuk kelompok miskin dan rentan, serta memberikan bantuan langsung tunai dampak El Nino pada bulan November-Desember. Bantuan-bantuan ini diharapkan dapat menjaga daya beli dan menahan kenaikan harga pangan lebih lanjut.

Pasar saham melanjutkan kinerja positif didukung ekspektasi berakhirnya pengetatan moneter the Fed di tahun 2024

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus menguat sepanjang triwulan terakhir pada tahun 2023. Hingga 15 Desember 2023, IHSG tercatat menguat sebesar 4,97 persen (*ytd*). Secara *mtd*, IHSG menguat sebesar 1,56 persen. Salah satu pendorong menguatnya IHSG memasuki triwulan IV 2023 adalah optimisme investor terhadap berakhirnya pengetatan kebijakan moneter the Fed di tahun 2024.

Sektor infrastruktur menjadi motor penguatan IHSG. Sepanjang tahun 2023, sektor infrastruktur menguat sebesar 80,9 persen (ytd). Di samping sektor tersebut, sektor barang baku juga menjadi sektor dengan penguatan terbesar, yakni sebesar 5,6 persen. Di sisi lain, sektor kesehatan dan sektor energi menjadi sektor dengan kinerja terburuk, masing-masing melemah 13,9 persen.

Di kawasan ASEAN, kinerja IHSG menjadi yang terbaik di tengah pelemahan indeks di kawasan. Indeks saham SET Thailand melemah sebesar 16,64 persen (ytd), indeks PSEI Filipina melemah sebesar 1,34 persen (ytd), indeks STI Singapura melemah sebesar 4,15 persen (ytd), dan indeks

KLCI Malaysia melemah sebesar 2,21 persen (ytd) pada periode yang sama.

Emitan baru yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) di bursa saham diperkirakan masih akan terus meningkat. Hingga 30 November 2023, terdapat 74 emiten baru yang telah melakukan (IPO) di bursa saham dengan total penghimpunan dana mencapai Rp52,99 triliun. Hingga akhir tahun 2023, diperkirakan terdapat tambahan sebanyak 64 emiten dengan rencana penawaran umum diperkirakan sebesar Rp11,18 triliun.

Kinerja pasar SBN solid seiring meningkatnya kepercayaan investor

Hingga 15 Desember 2023, pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan kinerja yang solid. Meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia dan pengelolaan fiskal Pemerintah menjadi faktor penopang menguatnya kinerja pasar SBN. Hal tersebut tercermin dari *yield* SBN berbagai tenor yang mengalami penurunan cukup dalam sehingga berpengaruh positif terhadap penurunan biaya utang Pemerintah. Sebagai contoh, SBN seri *benchmark* tenor 10 tahun mengalami penurunan *yield* paling dalam, yaitu sebesar 38,3 bps (ytd). Dibandingkan dengan kinerja *yield* negara berkembang lainnya, kinerja *yield* SBN Indonesia relatif lebih baik. Untuk tenor 10 tahun, *yield* surat utang pemerintah Malaysia turun sebesar 30,1 *bps*. Sementara itu, *yield* surat utang Pemerintah Thailand justru mengalami kenaikan, yaitu sebesar 11 *bps* (ytd). Kenaikan *yield* juga terjadi pada surat utang Pemerintah Afrika Selatan yang naik sebesar 65,3 *bps* (ytd).

Perbankan masih mendominasi kepemilikan SBN yang diperdagangkan. Per 14 Desember 2023, kepemilikan perbankan atas SBN mencapai Rp1.549,49 triliun, atau 27,53 persen dari total SBN yang diperdagangkan. Sementara itu, Bank Indonesia menjadi lembaga dengan kepemilikan terbesar kedua, yakni sebesar Rp1.041,03 triliun (*net*), atau mencapai 18,5 persen. Apabila dibandingkan dengan periode Januari 2023, kepemilikan SBN oleh perbankan dan Bank Indonesia mengalami penurunan. Di sisi lain, kepemilikan SBN lembaga dana pensiun dan perusahaan asuransi mengalami peningkatan, dari Rp872,85 triliun (16,2 persen) pada Januari 2023 menjadi Rp1.038,21 triliun (18,45 persen) pada 14 Desember 2023. Sementara, kepemilikan asing mengalami sedikit kenaikan, dari Rp811,89 triliun (15,1 persen) pada Januari 2023 menjadi Rp838,84 triliun (14,9 persen).

Sektor asuransi dan dana pensiun terus tumbuh di tengah tingginya dinamika global

Kinerja industri asuransi tetap terjaga. Sampai dengan Oktober 2023, akumulasi pendapatan premi asuransi, termasuk asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi mencapai Rp264,23 triliun atau tumbuh 3,54 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini membaik dibandingkan bulan September 2023 yang mengalami kontraksi sebesar 1,57 persen. Secara lebih detail, pendapatan premi asuransi jiwa tercatat sebesar Rp 146,52 triliun, atau terkontraksi 6,93 persen (yoy) karena penurunan premi pada *unit link*. Namun, premi pada asuransi umum dan reasuransi mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 20,40 persen (yoy) menjadi Rp117,72 triliun.

Aset asuransi sosial, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan mengalami kenaikan. Pada bulan Oktober 2023, aset asuransi sosial mencapai Rp824,40 triliun atau tumbuh 10,7 persen (yoy). Berdasarkan porsi kepemilikan, 86 persen (Rp709,22 triliun) aset dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan pertumbuhan 11,56 persen (yoy) pada Oktober 2023. Sementara itu, aset BPJS Kesehatan juga tumbuh positif sebesar 5,66 persen menjadi Rp115,18 triliun.

Lebih lanjut, jumlah investasi dan nilai aset dana pensiun juga terus meningkat. Sampai dengan bulan Oktober 2023, jumlah investasi tumbuh 5,63 persen menjadi Rp346,52 triliun. Sementara itu, nilai aset tercatat sebesar Rp358,63 triliun atau tumbuh 5,63 persen (yoy), masih terdapat ruang untuk pertumbuhan aset yang lebih tinggi. Ke depan, investasi dana pensiun diarahkan pada investasi yang aman dengan potensi pengembalian dana (*yield*) yang kompetitif, bukan hanya sekedar pada produk-produk yang aman seperti SBN.

OJK akan membentuk unit aktuaria pada tahun 2024 guna mendorong pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Unit tersebut akan melakukan analisis aktuaria mengenai kondisi demografi, perkembangan kondisi ekonomi, pengelolaan investasi, dan pemodelan. Keberadaan unit ini diharapkan dapat mendukung

pengembangan institusi keuangan nonbank, khususnya pada sektor asuransi dan dana pensiun.

Pengetatan kebijakan moneter global masih berlanjut

Perekonomian global melambat disertai dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi global masih melambat dipengaruhi oleh fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi akibat ketegangan politik yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Sementara itu, tekanan inflasi masih di atas sasaran meskipun mulai melandai. Hal ini dipengaruhi berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan ketatnya pasar tenaga kerja, terutama di AS dan Eropa. Dengan perkembangan inflasi tersebut, suku bunga kebijakan moneter termasuk *Federal Funds Rate* (FFR) diperkirakan akan bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih panjang (*high for longer*). *Yield* obligasi Pemerintah negara maju, khususnya AS (US Treasury), naik tinggi karena premi risiko jangka panjang (*term-premia*) terkait tingginya kebutuhan untuk pembiayaan fiskal AS. Situasi tersebut turut berdampak pada masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global yang memicu terbatasnya aliran modal ke negara berkembang dan mendorong penguatan Dolar AS.

BI mempertahankan tingkat suku bunga. Suku bunga BI-7DRR dipertahankan pada tingkat 6,0 persen pada bulan November 2023. Level suku bunga tersebut merupakan rekor tertinggi dalam empat tahun terakhir. Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur BI bulan November sekaligus menjadi upaya pre-emptive dan *forward looking* dalam rangka mengantisipasi dampak *inflated inflation* untuk mempertahankan inflasi umum tetap di dalam rentang 3,0±1 persen.

GRAFIK 20

Perkembangan BI7DRR, inflasi, dan rupiah

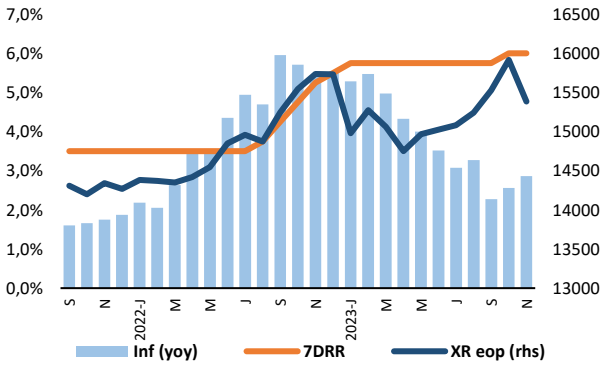

Sumber: BI dan BPS, diolah

Pertumbuhan uang beredar mengalami perlambatan signifikan di Oktober 2023. Pertumbuhan uang beredar (M2) pada bulan Oktober 2023 melambat menjadi 3,4 persen (yoy). Demikian juga pertumbuhan M1 turun ke 0,1 persen. Pertumbuhan uang kuasi sedikit turun ke 7,8 persen. Penurunan M1 terutama didorong oleh Giro yang mencatat kontraksi (-5,5 persen dari 6,9 persen di bulan sebelumnya). Berdasarkan faktor pertumbuhannya, kontribusi pertumbuhan *Net Foreign Asset* (NFA) sedikit menurun dan mengalami perlambatan, terutama didorong penurunan tagihan terhadap nonresiden. Sementara itu, komponen *Net Domestic Asset* (NDA) mencatat penurunan secara signifikan. Sementara itu, suku bunga pasar keuangan (JIBOR, PUAB) bergerak mengikuti suku bunga acuan.

Perkembangan kredit perbankan tercatat stabil. Pada Oktober 2023, pertumbuhan berada di angka 8,7 persen (yoy). Rata-rata tertimbang suku bunga kredit sebesar 9,37 persen, stabil dibandingkan bulan sebelumnya di level 9,36 persen. Secara garis besar, suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) naik tipis, sementara suku bunga Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) relatif stabil dibanding bulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaannya, KMK tumbuh 8,0 persen (yoy), bersumber dari pertumbuhan sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan. KI tumbuh 9,4 persen (yoy), terutama ditopang sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. KK tumbuh 9,1 persen (yoy) terutama didorong oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaran Bermotor (KKB), dan Kredit Multiguna.

GRAFIK 21

Pertumbuhan kredit

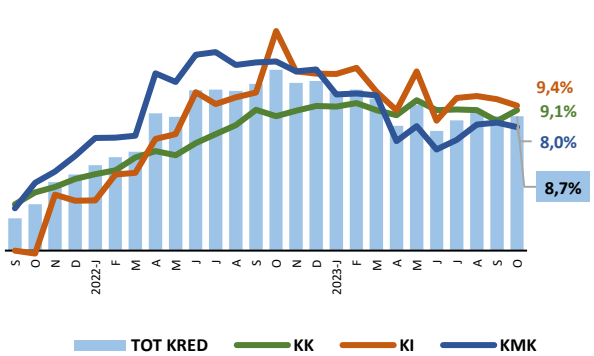

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan DPK mengalami penurunan signifikan. Per Oktober 2023 DPK tumbuh yaitu tumbuh 3,9 persen (yoy) dari 6,4 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan giro, khususnya giro rupiah yang terkontraksi 4,6 persen (yoy). Sementara itu, tabungan dan simpanan berjangka valas terus mencatat defisit sejak semester II 2023. Namun demikian, *share* tabungan relatif kecil dibandingkan dengan giro. Kontraksi pertumbuhan giro seiring dengan komponen M1-Giro Rupiah juga mencatat kontraksi (-5,5 persen yoy). Suku bunga simpanan berjangka meningkat pada seluruh tenor, yaitu 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan, masing-masing sebesar 4,43 persen; 4,82 persen; 5,11 persen; 5,17 persen; dan 5,48 persen pada Oktober 2023, setelah pada bulan sebelumnya masing-masing tercatat sebesar 4,32 persen; 4,73 persen; 5,02 persen; 5,13 persen; dan 5,45 persen.

GRAFIK 22

Pertumbuhan DPK

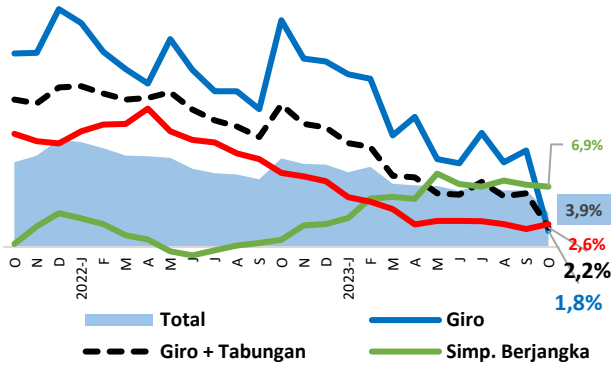

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan *tier* nilai simpanan, pertumbuhan simpanan ditopang oleh simpanan > Rp2 miliar - 5 miliar. Pertumbuhan nilai simpanan rekening pada *tier* terkecil (≤Rp500juta) tercatat mengalami penurunan namun jumlah rekening mengalami peningkatan per Oktober 2023. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan jumlah rekening yang tidak diimbangi dengan penambahan nilai dalam rekening. Hal tesebut juga dapat menggambarkan bahwa masyarakat kelas bawah dan menengah menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, terjadi penurunan cukup tajam pada kelompok rekening "super kaya" (di atas Rp5 miliar) dengan jumlah rekening cenderung stabil. Penurunan simpanan super kaya tersebut disebabkan karena adanya proses disinvestasi untuk ekspansi bisnis yang dilakukan.

Hasil pemantauan berbagai indikator menunjukkan ketahanan sistem keuangan Indonesia masih tetap terjaga. Hingga bulan Oktober 2023, tingkat profitabilitas perbankan masih tetap terjaga. Hal ini tercermin dari *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 4,89 persen dan *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,73 persen. Namun demikian, perlu disadari bahwa NIM tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan biaya pengelolaan kredit yang masih kurang efisien dibandingkan negara *peers* di kawasan. Risiko kredit juga masih terjaga, ditunjukkan oleh tren penurunan *Non-Performing Loan* (NPL) hingga 2,42 persen. Selain itu, permodalan perbankan dinilai masih tetap kuat dengan posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada bulan Oktober 2023 yang tetap tinggi sebesar 27,48 persen.

GRAFIK 23

Risiko kredit, profitabilitas, dan kecukupan permodalan perbankan

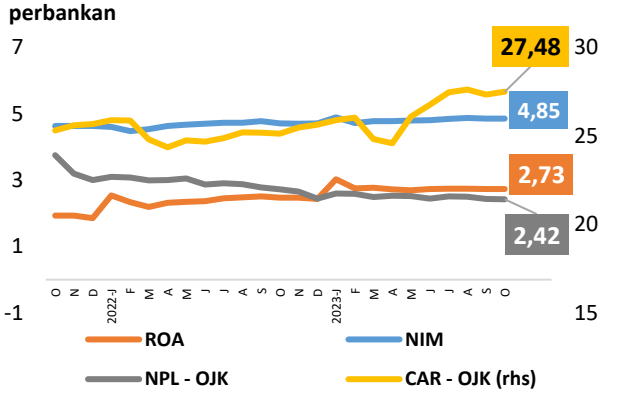

Sumber: OJK dan Sekretariat KSSK, diolah

Volatilitas pasar keuangan global meningkat. Sepanjang Q3 2023 terjadi peningkatan risiko volatilitas pada pasar keuangan global yang berimbas ke domestik hingga awal November 2023. Kondisi tersebut berdampak pada keluarnya aliran modal dari *emerging market*, termasuk Indonesia. Namun demikian, di bulan November 2023 tekanan pada pasar global mereda hingga kembali mendorong *inflow* terutama pada pasar SBN. Secara ytd, hingga 14 Desember 2023, *capital inflow* di pasar SBN tercatat sebesar Rp76,66 triliun sementara pasar saham mencatatatkan *outflow* Rp14,39 triliun sehingga secara total tercatat *net inflow* sebesar Rp62,27 triliun. Perkembangan aliran modal asing di pasar modal domestik turut mendukung penguatan nilai tukar, memperkuat dampak positif dari surplus neraca perdagangan.

Premi risiko investasi (CDS 5 th.) menurun. Penuranan mulai pada awal November hingga mencapai level 70,21 pada pertengahan Desember 2023 seiring meredanya tekanan global. Kondisi ini terjadi setelah terjadi peningkatan volatilitas tekanan di sepanjang bulan Agustus hingga akhir Oktober 2023. Perkembangan positif sejak November mendorong *inflow* pada SBN yang berlanjut hingga pertengahan Desember. Seiring dengan *inflow*, *yield* SUN 10Y kembali menurun ke level 6,59 persen (posisi 14 Desember 2023) dibandingkan posisi tertinggi pada bulan Oktober 2023 di level 7,26 persen. Kondisi ini sejalan dengan penurunan *credit default swap* (CDS) 5 tahun yang mencerminkan membaiknya perspepsi investor terhadap instrumen investasi Indonesia. Meskipun mengalami penurunan, *yield* SUN secara *ytd* masih cukup memiliki daya saing apabila dibandingkan dengan *peers*. Perkembangan aliran modal masuk juga cukup kuat untuk mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah di pertengahan bulan Desember 2023 sebesar 1,51 persen pada level 15.493 per USD dengan rata-rata secara *ytd* di 15.247 per USD.

GRAFIK 24

Net capital *inflow* turut mendorong apresiasi pada nilai tukar rupiah

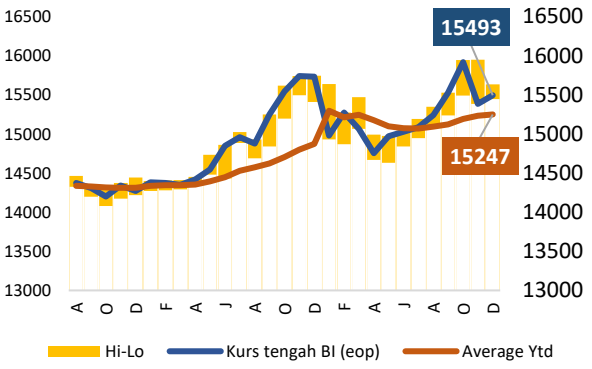

Sumber: Bloomberg, diolah

Cadangan devisa mengalami penurunan. Di tengah Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mencatat surplus USD0,3 miliar, cadangan devisa menurun USD7,7 miliar. Hal ini disebabkan penggunaan cadangan devisa yang cukup besar untuk mengatasi tekanan nilai tukar, terutama di semester I tahun 2022. Memasuki semester berikutnya stabilisasi juga ditempuh dengan kenaikan suku bunga 7DRR sehingga penggunaan cadev dapat dikurangi. Posisi cadev di bulan November 2023 mencapai USD138,1 miliar atau setara 6,1 impor dan pembayaran cicilan utang luar negeri.

GRAFIK 25

Perkembangan cadangan devisa

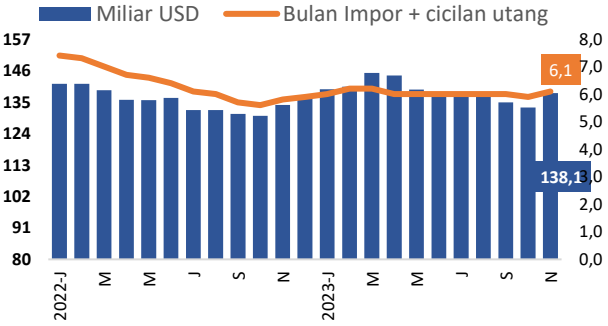

Sumber: Bloomberg, diolah

Soliditas neraca perdagangan Indonesia masih terjaga

Neraca perdagangan masih mencatat surplus. Dinamika perlambatan ekonomi global membawa implikasi pada kinerja sektor eksternal Indonesia. Sampai triwulan III 2023, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar USD27,74 miliar, terkontraksi sebesar 30,4 persen (yoy) dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD39,85 miliar. Kontraksi ini didorong oleh kinerja ekspor yang menurun lebih dalam dibandingkan penurunan impor. Penurunan ekspor didorong oleh penurunan ekspor migas dan nonmigas, terutama karena turunnya harga komoditas di tengah peningkatan volume ekspor. Di sisi lain, impor juga menunjukkan kontraksi, didorong oleh penurunan harga komoditas migas dan nonmigas yang dibarengi dengan peningkatan volume impor.

Ekspor menguat dibandingkan bulan sebelumnya (mtm) namun terkontraksi secara yoy. Memasuki triwulan IV 2023, kinerja sektor eksternal Indonesia juga masih positif. Pada bulan Oktober 2023, ekspor tercatat sebesar USD22,15 miliar, atau tumbuh 6,8 persen (mtm, fob, USD), namun menunjukkan kontraksi sebesar 10,4 persen (yoy, fob, USD). Kinerja ekspor masih didominasi oleh ekspor manufaktur dengan kontribusi mencapai 72,9 persen dari total ekspor dengan pertumbuhan 4,8 persen (mtm, fob, USD), namun terkontraksi 5,0 persen (yoy, fob, USD). Peningkatan ekspor pada bulan Oktober 2023 juga terjadi pada sektor pertambangan yang tumbuh tinggi sebesar 20,5 persen (mtm, fob, USD) dan terkontraksi sebesar 28,6 persen (yoy, fob, USD). Ekspor sektor pertanian tumbuh sebesar 4,8

persen (mtm, fob, USD) dan mengalami kontraksi sekitar 5,0 persen (yoy, fob, USD). Secara umum, faktor harga masih dominan memengaruhi kinerja ekspor sekalipun pengaruh volume sebagai indikasi permintaan negara-negara mitra dagang juga cukup besar.

global dan volume barang. Dari sisi penggunaan, impor terbesar bersumber dari impor bahan baku/penolong (72,0%), impor barang modal (18,3%), dan barang konsumsi (9,7%). Impor barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal tumbuh masing-masing 9,2 persen (mtm, cif, USD); 5,9 persen (mtm, cif, USD); dan 14,5 persen

GRAFIK 26

Neraca perdagangan (Miliar USD)

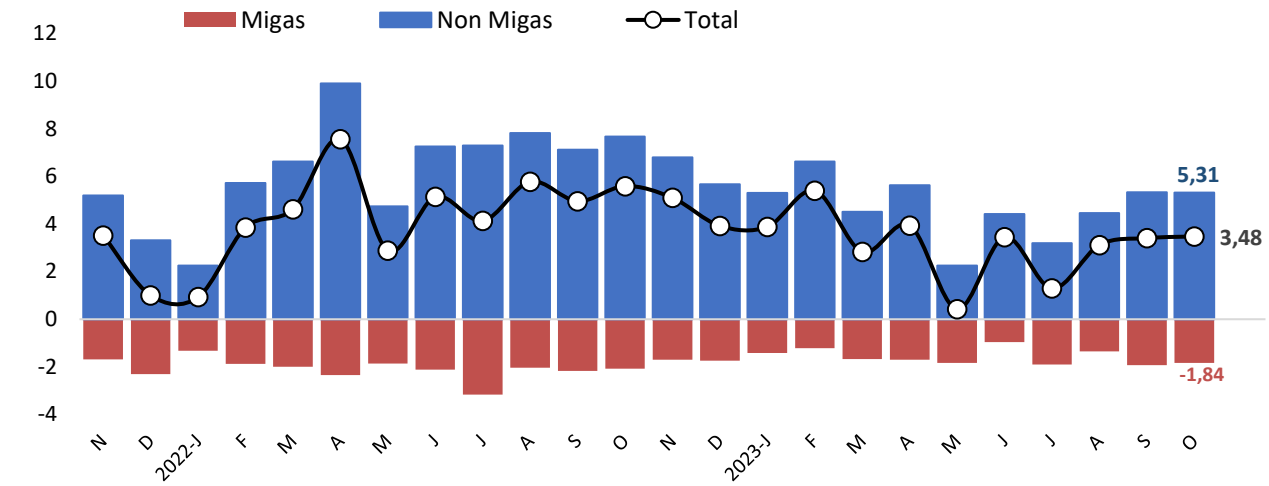

Sumber : BPS (diolah)

Impor menguat dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun menguat, namun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 (yoy), impor bulan Oktober 2023 mengalami kontraksi. Kinerja impor pada bulan Oktober 2023 tercatat sebesar USD18,67 miliar, atau tumbuh sebesar 7,7 persen (mtm, cif, USD), namun mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen (yoy, cif, USD), terutama karena pengaruh harga komoditas

(mtm, cif, USD). Di sisi lain, impor barang konsumsi dan barang modal tumbuh masing-masing sebesar 3,8 persen (yoy, cif, USD) dan 11,1 persen (yoy, cif, USD), sementara impor bahan baku/penolong turun 6,1 persen (yoy, cif, USD). Impor barang modal yang tinggi memberikan indikasi berlanjutnya aktivitas produksi dalam mendorong pemulihan perekonomian domestik lebih lanjut.

GRAFIK 27

Ekspor impor (nilai dan pertumbuhan yoy)

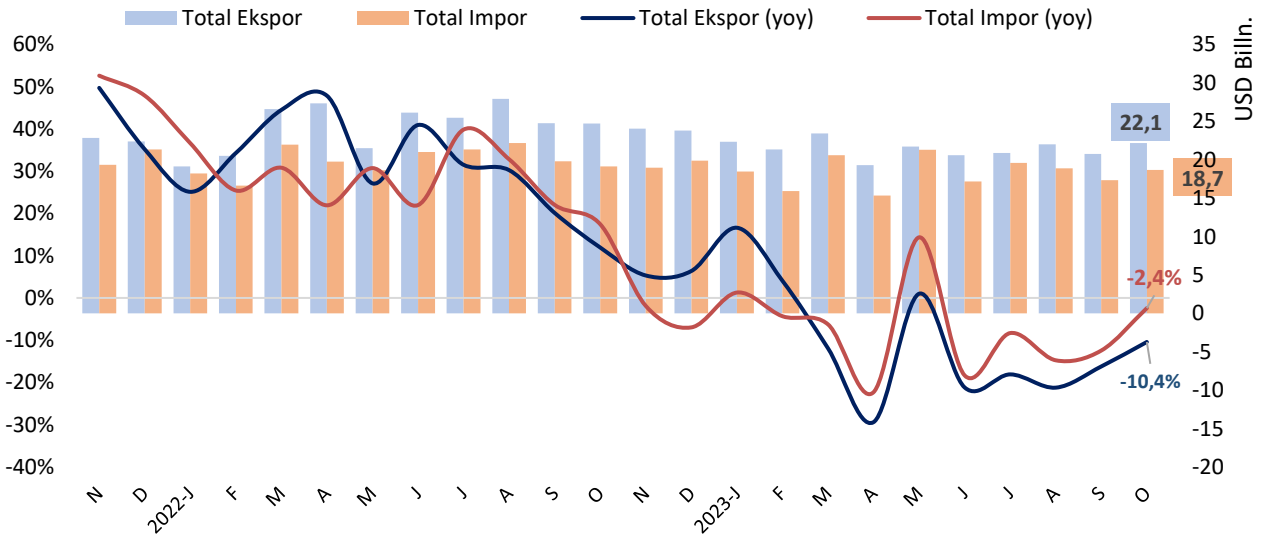

Sumber : BPS (diolah)

Secara kumulatif, ekspor dan impor mengalami kontraksi. Secara kumulatif sampai dengan bulan Oktober 2023, ekspor mencapai USD214,41 miliar atau terkontraksi 12,2 persen (ytd, fob, USD), sementara impor mencapai USD183,19 miliar atau terkontraksi 7,7 persen (ytd, cif, USD). Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan secara kumulatif tercatat sebesar USD31,22 miliar, terdiri atas surplus nonmigas sebesar USD47,02 miliar dan defisit migas sebesar USD15,81 miliar. Ke depan, kinerja ekspor-impor Indonesia diperkirakan masih berada dalam tren positif. Permintaan sejumlah negara yang menunjukkan penguatan diharapkan mampu menopang perbaikan kinerja ekspor. Sementara itu, impor diperkirakan masih ekspansif seiring dengan aktivitas ekonomi domestik, terutama industri manufaktur yang menunjukkan tren ekspansi sebagaimana terlihat pada PMI Indonesia yang ekspansif.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) membaik dan menopang ketahanan eksternal

Neraca pembayaran Indonesia membaik. Pada triwulan III 2023, neraca pembayaran Indonesia (NPI) mencatatkan defisit sebesar USD1,46 miliar, membaik dibandingkan defisit pada triwulan II 2023 sebesar USD7,37 miliar namun meningkat dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun 2022 sebesar USD1,30 miliar. Perbaikan NPI ini ditopang oleh perbaikan neraca transaksi berjalan (TB) serta transaksi modal dan finansial (TMF). Secara kumulatif, sampai dengan triwulan III 2023 terjadi defisit NPI sebesar USD2,32 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang mengalami defisit sebesar USD0,73.

Neraca transaksi berjalan menguat. Kinerja neraca TB pada triwulan III 2023 mencatat defisit sebesar USD0,86 miliar (0,2 persen dari PDB), jauh menurun dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar USD2,21 miliar (0,6 persen dari PDB). Penurunan defisit neraca TB didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan non migas yang lebih besar dibandingkan peningkatan defisit neraca perdagangan migas, serta penurunan defisit neraca jasa dan pendapatan primer seiring dengan surplus neraca pendapatan sekunder yang relatif stabil. Secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2023, neraca TB mencatatkan defisit sebesar USD0,11 miliar (0,01 persen dari PDB), berbalik arah dibandingkan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar USD9,13 miliar (0,9 persen dari PDB).

Surplus neraca perdagangan tercatat meningkat. Neraca perdagangan barang pada triwulan III 2023 mencatat surplus sebesar USD10,27 miliar, meningkat dibandingkan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD10,13 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas, sehingga mampu mengimbangi peningkatan defisit neraca perdagangan migas.

Ekspor nonmigas meningkat didorong oleh harga komoditas dan permintaan dari negara mitra. Peningkatan ekspor nonmigas ditopang oleh komoditas utama seperti besi dan baja, nikel, berbagai produk kimia, bijih, kerak, dan abu logam, bahan kimia organik dan bahan kimia anorganik, plastik dan barang dari plastik, kayu, barang dari kayu, pakain dan asesorisnya (rajutan), serta pakain dan asesorisnya (bukan rajutan). Permintaan dari sejumlah negara mitra dagang utama terhadap komoditas ekspor nonmigas yang juga cukup tinggi pada triwulan III 2023, antara lain ke Tiongkok, India, dan Vietnam.

Peningkatan defisit migas didorong oleh meningkatnya defisit neraca minyak yang lebih tinggi. Defisit neraca minyak meningkat akibat kenaikan impor minyak yang lebih besar dibandingkan ekspor minyak di tengah tren harga minyak yang meningkat. Peningkatan surplus neraca gas ditopang oleh kenaikan ekspor gas yang lebih tinggi di tengah penurunan impor gas.

Surplus neraca perdagangan barang menurun. Secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2023 surplus neraca perdagangan barang mencapai USD48,80 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun 2022 sebesar USD65,08 miliar. Meskipun lebih rendah namun surplus neraca perdagangan barang masih terjaga, ditopang oleh peningkatan surplus neraca nonmigas yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan defisit neraca migas.

Defisit neraca jasa tercatat turun. Pada triwulan III 2023, defisit neraca jasa mencapai USD4,11 miliar, menyempit dibandingkan defisit pada periode sebelumnya yang sebesar USD4,73 miliar, didorong oleh pembalikan posisi neraca jasa

perjalanan dari defisit pada periode sebelumnya menjadi surplus. Pembalikan ini terjadi akibat peningkatan penerimaan dari perjalanan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia lebih besar dibandingkan pembayaran jasa perjalanan ke luar negeri (wisatawan nasional/Wisnas).

Jasa perjalanan wisman meningkat, sementara dari sisi wisnas relatif stabil. Peningkatan jasa perjalanan Wisman didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan Wisman dari 2,9 juta menjadi 3,3 juta seiring dengan peningkatan mobilitas dan penyelenggaraan beberapa *event* internasional. Wisman terbesar yang berkunjung ke Indonesia pada triwulan II 2023 adalah Malaysia, Singapura, Australia, Timor Leste, India, dan Tiongkok. Sementara itu, jasa Wisnas dalam periode yang sama menunjukkan jumlah kunjungan yang relatif stabil sebanyak 2,2 juta, terutama didorong oleh normalisasi pengeluaran Wisnas selama perjalanan ke luar negeri pasca penyelenggaran ibadah haji/umrah.

Defisit jasa transportasi meningkat. Jasa transportasi yang menjadi penyumbang terbesar terhadap defisit neraca jasa, pada triwulan III 2023 mencatat defisit yang sedikit lebih besar dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya, terutama didorong oleh peningkatan jasa transportasi barang (*freight*) sejalan dengan peningkatan ekspor dan impor barang. Sementara itu, jasa-jasa lainnya, seperti jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, serta jasa bisnis lainnya pada triwulan III 2023 mengalami peningkatan defisit, sedangkan jasa-jasa keuangan dan biaya penggunaan kekayaan intelektual menunjukkan penurunan defisit. Secara kumulatif, defisit neraca jasa sampai dengan triwulan III 2023 tercatat sebesar USD13,41 miliar, lebih rendah dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD14,72 miliar.

Defisit neraca pendapatan primer tercatat menurun. Neraca pendapatan primer pada triwulan III 2023 mencatat defisit sebesar USD8,49 miliar, lebih rendah dibandingkan defisit pada periode sebelumnya sebesar USD9,16 miliar. Penurunan defisit tersebut bersumber dari pembayaran imbal hasil atas investasi asing yang lebih rendah dibandingkan pendapatan hasil investasi penduduk di luar negeri. Penurunan pembayaran imbal hasil investasi bersumber dari investasi portofolio dan investasi langsung, sejalan dengan siklus bisnis dan meningkatnya ketidakpastian di pasar global. Sementara itu, pendapatan penduduk atas investasi di luar negeri bersumber dari investasi portofolio, baik yang bersumber imbal hasil ekuitas maupun dari pendapatan utang (bunga) menunjukkan penurunan seiring dengan perlambatan ekonomi global. Secara kumulatif, defisit neraca pendapatan primer sampai dengan triwulan III 2023 tercatat sebesar USD26,27 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun 2022 sebesar USD26,30 miliar.

Surplus neraca pendapatan sekunder menurun. Neraca pendapatan sekunder pada triwulan III 2023 mencatat surplus sebesar USD1,46 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD1,54 miliar. Surplus neraca pendapatan sekunder antara lain bersumber dari penerimaan dana hibah (*grants*) oleh Pemerintah dan transfer personal melalui remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) yang yang relatif stabil pada kisaran USD2,7 miliar, di tengah peningkatan remitansi tenaga kerja asing (TKA) seiring dengan kenaikan jumlah TKA untuk pengerjaan proyek-proyek di dalam negeri. Sampai dengan triwulan III jumlah PMI yang bekerja di luar negeri tercatat sebanyak 3,6 juta orang, bertambah sebanyak 72,2 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 2,5 juta orang. Secara kumulatif, surplus neraca pendapatan sekunder sampai dengan triwulan III 2023 tercatat sebesar USD4,49 miliar, meningkat dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun 2022 sebesar USD4,43 miliar.

Neraca transaksi modal dan finansial membaik secara signifikan. Kinerja neraca TMF pada triwulan III 2023 mencatat defisit sebesar USD0,28 miliar (0,1 persen dari PDB), menurun signifikan dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai USD4,85 miliar (1,4 persen dari PDB). Secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2023, neraca TMF juga menunjukkan perbaikan signifikan, yang ditandai dengan penurunan defisit dari sebesar USD8,98 miliar (0,9 persen dari PDB) pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi sebesar USD1,11 miliar (0,1 persen dari PDB). Penurunan defisit TMF pada triwulan III 2023 ditopang oleh arus modal investasi langsung

dan investasi lainnya yang mencatat surplus, sehingga mereduksi tekanan peningkatan defisit investasi portfolio.

Investasi langsung masih menunjukkan kinerja positif, meskipun menurun. Investasi langsung pada triwulan III 2023 mencapai USD2,77 miliar, menurun dibandingkan triwulan II 2023 yang sebesar USD4,00 miliar. Penurunan ini terutama bersumber dari penurunan arus masuk penyertaan modal asing dalam bentuk ekuitas di tengah terjadinya peningkatan arus masuk dalam bentuk instrumen utang. Meskipun menurun, surplus investasi langsung masih tetap terjaga di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global. Hal ini mengindikasikan masih terjaganya optimisme investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi di dalam negeri. Secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2023 investasi langsung mencatat surplus sebesar USD11,03 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun 2022 sebesar USD14,75 miliar.

Investasi portfolio mencatat peningkatan defisit. Di sisi lain, investasi portfolio mencatatkan defisit sebesar USD 3,13 miliar, meningkat dibandingkan defisit pada triwulan II 2023 sebesar USD2,63 miliar, seiring dengan peningkatan arus keluar modal dari pasar saham dan obligasi akibat dari ketidakpastian global yang meningkat di tengah arus masuk modal asing melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Peningkatan defisit investasi portfolio ini merefleksikan kepercayaan investor terhadap imbal hasil investasi di luar negeri yang meningkat dengan risiko yang lebih rendah (aman) di tengah ketidakpastian perekonomian global. Secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2023 investasi portfolio mencatat defisit sebesar USD2,73 miliar, lebih rendah dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun 2022 sebesar USD9,91 miliar.

Kinerja investasi lainnya membaik. Pada triwulan III 2023, transaksi investasi lainnya mengalami surplus sebesar USD0,07 miliar, setelah mencatat defisit sebesar USD6,20 miliar pada triwulan sebelumnya. Surplus ini terutama bersumber dari arus dana masuk neto dalam bentuk kas dan simpanan, pinjaman luar negeri yang lebih besar dari pembayarannya serta pembayaran neto pinjaman dan utang dagang yang lebih rendah. Secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2023 investasi lainnya mencatat defisit sebesar USD9,43 miliar, lebih rendah dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun 2022 sebesar USD13,82 miliar.

Cadangan devisa menurun, namun masih berada di atas *threshold*. Secara keseluruhan, berdasarkan perkembangan NPI pada triwulan III 2023, posisi cadangan devisa pada akhir triwulan III 2023 mencapai USD134,86 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi pada akhir triwulan

TABEL 2

Perkembangan neraca pembayaran Indonesia (dalam USD miliar)

	2021					2022					2023		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1*	Q2*	Q3**
Transaksi Berjalan	**-1.14**	**-1.88**	**5.02**	**1.51**	**3.51**	**0.55**	**3.95**	**4.63**	**3.75**	**12.87**	**2.96**	**-2.21**	**-0.86**
A. Barang	7.63	8.34	15.41	12.43	43.81	11.30	16.80	17.62	16.95	62.67	14.68	10.13	10.27
- Ekspor, fob	49.38	54.32	61.65	67.49	232.84	66.77	75.17	77.84	72.76	292.54	67.30	61.97	63.97
- Impor, fob	-41.75	-45.98	-46.24	-55.05	-189.03	-55.47	-58.38	-60.21	-55.81	-229.87	-52.62	-51.84	-53.70
a. Nonmigas	9.98	11.58	18.12	18.13	57.80	17.21	24.44	25.16	22.96	89.77	19.01	15.16	15.87
b. Migas	-2.27	-3.14	-2.51	-5.04	-12.97	-5.69	-7.19	-6.48	-5.42	-24.78	-4.00	-4.55	-5.18
B. Jasa - jasa	-3.45	-3.66	-3.53	-3.96	-14.60	-4.37	-5.02	-5.33	-5.53	-20.25	-4.57	-4.73	-4.11
C. Pendapatan Primer	-6.75	-8.02	-8.27	-8.91	-31.96	-7.87	-9.35	-9.08	-9.63	-35.93	-8.63	-9.16	-8.49
D. Pendapatan Sekunder	1.43	1.46	1.42	1.95	6.26	1.49	1.52	1.41	1.95	6.37	1.48	1.54	1.46
Transaksi Modal dan Finansial	**10.36**	**6.93**	**10.79**	**1.70**	**12.57**	**-1.92**	**-1.78**	**-5.28**	**0.40**	**-8.58**	**4.02**	**-4.85**	**-0.28**
1. Investasi Langsung	4.92	3.99	1.20	-5.02	17.29	4.65	6.62	3.48	3.42	18.17	4.29	3.97	2.77
2. Investasi Portofolio	0.11	0.02	0.17	0.03	5.09	-3.18	-3.61	-3.12	-1.72	-11.63	3.03	-2.63	-3.13
3. Derivatif Finansial	-3.72	-7.87	2.46	-1.09	0.33	0.14	-0.09	0.01	-0.01	0.05	0.20	-0.08	-0.05
4. Investasi Lainnya	4.70	-0.34	12.34	-0.62	-10.21	-3.53	-4.70	-5.66	-1.74	-15.62	-3.51	-6.11	0.12
Total	**-0.63**	**-0.11**	**-1.65**	**-0.22**	**16.08**	**-1.37**	**2.17**	**-0.65**	**4.14**	**4.29**	**6.98**	**-7.05**	**-1.14**
Selisih Perhitungan Bersih	4.06	-0.45	10.69	-0.84	-2.62	-0.45	0.22	-0.65	0.59	-0.29	-0.46	-0.32	-0.32
Neraca Keseluruhan	**4.06**	**-0.45**	**10.69**	**-0.84**	**13.46**	**-1.82**	**2.39**	**-1.30**	**4.73**	**4.00**	**6.52**	**-7.37**	**-1.46**
Memorandum :													
Posisi Cadangan Devisa	**137.10**	**137.09**	**146.87**	**144.91**	**144.91**	**139.13**	**136.38**	**130.78**	**137.23**	**137.23**	**145.19**	**137.54**	**134.86**
Dalam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah	9.66	8.78	8.64	7.77	7.77	6.97	6.41	5.73	5.90	5.90	6.22	5.98	5.97
Transaksi Berjalan (% PDB)	-0.41%	-0.65%	1.67%	0.48%	0.30%	0.18%	1.17%	1.36%	1.14%	0.98%	0.89%	-0.63%	-0.25%

Sumber : BPS (diolah)

sebelumnya sebesar USD137,54 miliar. Meskipun turun, namun posisi cadangan devisa ini masih setara dengan 5,97 bulan pembayaran impor serta pembayaran utang luar negeri pemerintah atau berada di atas standar kecukupan internasional (*threshold*) selama 3 bulan impor. Hingga bulan Oktober 2023, posisi cadangan devisa Kembali turun ke level USD 133,14 miliar, atau setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan di atas *treshold*. Posisi cadangan devisa yang relatif cukup tinggi diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

APBN memperlihatkan kinerja yang lebih kuat ditopang oleh pendapatan negara yang tumbuh positif dan belanja negara yang tumbuh optimal

Pendapatan negara tumbuh positif, melanjutkan tren dari awal tahun

Memasuki akhir tahun 2023, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah mencatatkan kinerja positif. Hingga 12 Desember 2023, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat sebesar Rp2.553,15 triliun atau telah mencapai 99,73 persen dari target pada Perpres 75/2023. Capaian tersebut lebih tinggi Rp101,33 triliun dari periode yang sama tahun lalu, dengan menjaga tren kinerja yang masih positif sejak awal tahun 2023. Dari sisi pertumbuhan, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tumbuh 4,13 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode bulan sebelumnya. Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.996,38 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp554,48 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp2,29 triliun. Berdasarkan level pertumbuhan, realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 4,38 persen (yoy) dan 3,12 persen (yoy), sedangkan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Negara tersebut terhadap target pada Perpres 75/2023 untuk Perpajakan sebesar 94,24 persen sementara PNBP telah melebihi target dengan capaian 125,62 persen.

Realisasi Penerimaan Perpajakan sampai dengan mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai, di mana hingga 12 Desember 2023 capaian Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp1.739,84 triliun dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp256,54 triliun. Kinerja Penerimaan Perpajakan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan periode bulan sebelumnya. Kinerja Penerimaan Perpajakan didukung oleh kinerja Pajak yang tumbuh 7,26 persen (yoy), sementara Kepabeanan dan Cukai hingga 12 Desember 2023 masih mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi 11,71 persen (yoy) namun lebih kecil dibandingkan periode bulan sebelumnya. Realisasi penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai tersebut masing-masing telah mencapai 95,69 persen dan 85,48 persen terhadap target pada Perpres 75/2023. Kinerja perpajakan dipengaruhi oleh faktor pemulihan ekonomi, moderasi harga komoditas, dan dampak dari kebijakan perpajakan yang tidak berulang di tahun 2023.

Secara nominal, penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Penerimaan PPh Nonmigas sampai dengan 12 Desember 2023 tercatat sebesar Rp951,83 triliun sedangkan PPN/PPnBM tercatat sebesar Rp683,32 triliun. Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut terhadap total penerimaan Pajak masing-masing sebesar 54,71 persen dan 39,27 persen.

Penerimaan PPh Nonmigas secara nominal ditopang oleh tiga komponen terbesar penerimaan PPh Nonmigas yaitu PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Kontribusi ketiganya mencapai 73,73 persen terhadap total penerimaan PPh Nonmigas. Berdasarkan level pertumbuhan, PPh Nonmigas tumbuh 6,72 persen (yoy), didukung terutama oleh pertumbuhan dua komponen utamanya, yaitu PPh 25/29 Badan dan PPh 21 yang berturut-turut tumbuh 16,64 persen (yoy) dan 17,15 persen (yoy). Capaian kinerja komponen PPh Nonmigas tersebut meningkat

dibandingkan periode bulan sebelumnya. Sementara, pertumbuhan PPh Final hingga 12 Desember 2023 tercatat masih berada di zona kontraksi yaitu 25,65 persen (yoy) namun dengan level kontraksi yang lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan komponen penerimaan PPh Nonmigas tersebut dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi, utilisasi tenaga kerja akibat perbaikan gaji dan upah di samping beberapa faktor tekanan yaitu moderasi harga komoditas, restitusi, dan kebijakan yang tidak berulang.

Realisasi penerimaan Pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM secara nominal ditopang oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Kontribusi dari kedua komponen tersebut masing-masing sebesar 60,53 persen dan 35,14 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM. Secara kumulatif, PPN/PPnBM tumbuh sebesar 8,78 persen (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Hingga 12 Desember 2023, PPN DN tumbuh 18,03 persen (yoy) namun PPN Impor kembali terkontraksi 5,13 persen (yoy) meskipun level kontraksi tersebut lebih *mild* dibandingkan bulan sebelumnya. Masih tumbuhnya penerimaan PPN DN didorong oleh terjaganya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, sementara pengaruh pembayaran kompensasi BBM yang tidak berulang serta peningkatan dari restitusi PPN DN memberikan tekanan terhadap kinerja PPN DN. Untuk PPN Impor, kinerja saat ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya nilai impor dibandingkan tahun lalu.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai masih mengalami kontraksi namun membaik dibandingkan periode bulan sebelumnya. Capaian realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terdiri dari penerimaan Cukai Rp196,66 triliun, Bea Masuk (BM) Rp47,58 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp12,31 triliun. Secara nominal, penerimaan Kepabeanan dan Cukai terutama didukung oleh penerimaan dari Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan kontribusi mencapai 73,65 persen terhadap total penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Hingga 12 Desember 2023, kinerja komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai seluruhnya mengalami kontraksi pertumbuhan, baik penerimaan Cukai, BM, maupun BK yang masing-masing untuk Cukai sebesar 3,52 persen (yoy), BM 0,12 persen (yoy), dan BK 68,54 persen (yoy). Kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 12 Desember secara keseluruhan didukung oleh upaya optimalisasi penerimaan melalui perbaikan layanan dan pengawasan. Lebih lanjut, kinerja penerimaan Cukai mengalami penurunan terutama akibat turunnya produksi HT untuk pengendalian konsumsi dan upaya pengawasan rokok ilegal. Sementara itu, kinerja BM dipengaruhi oleh penurunan nilai impor dan peningkatan pemanfaatan FTA. Di sisi lain, kinerja BK masih dipengaruhi terutama faktor harga produk sawit yang lebih rendah meskipun secara volume terjadi peningkatan ekspor, serta turunnya harga dan volume ekspor komoditas tembaga dan bauksit.

Kinerja PNBP meningkat. Menjelang akhir tahun 2023, kinerja capaian PNBP tumbuh 3,12 persen dengan tingkat capaian 107,50 persen (Perpres 75/2023) atau tingkat capaian 125,62 persen (Perpres 130/2022). Hingga 12 Desember 2023, realisasi PNBP sekitar Rp554,48 triliun, lebih tinggi dibandingkan capaian di periode yang sama tahun 2022 yang tercatat Rp537,70 triliun. Meskipun tingkat capaian tinggi, dari sisi pertumbuhan relatif terbatas di 3,12 persen (yoy) sementara pertumbuhan di periode yang sama tahun 2022 mencapai 34,30 persen (yoy).

Dilihat dari tingkat pertumbuhannya, kinerja PNBP disumbangkan oleh PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan dan PNBP Pendapatan BLU yang tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Lonjakan kenaikan signifikan terjadi pada PNBP yang bersumber dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang menunjukan kinerja yang sangat positif, tumbuh 100,87 persen. Hingga 12 Desember 2023, PNBP KND telah mencapai Rp81,54 triliun; melampaui target APBN 2023 (Perpres 75/2023) sebesar Rp81,53 triliun atau (Perpres 130/2022) sebesar Rp49,10 triliun; dan jauh lebih tinggi dibandingkan capaian 2022 yang mencapai Rp40,60 triliun. Capaian positif PNBP KND terutama didorong oleh kenaikan setoran dividen BUMN seiring peningkatan kinerja keuangan BUMN di tahun buku 2022. Selain PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan, kinerja PNBP Pendapatan BLU turut mendorong tetap tumbuhnya PNBP di 2023, sebesar 5,30 persen. Realisasi PNBP dari Pendapatan BLU sampai 12 Desember 2023 mencapai Rp80,75 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian di 2022 yang sebesar Rp76,69 triliun.

Beberapa jenis kelompok PNBP yang menunjukkan kinerja pertumbuhan negatif di 2023 adalah PNBP SDA dan PNBP Lainnya. Kinerja PNBP SDA sampai dengan 12 Desember 2023 mencapai Rp239,93 triliun atau melambat 1,80 persen (yoy), dari Rp244,31 triliun di 2022. Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan pada PNBP SDA Migas yang lebih besar dibandingkan peningkatan PNBP SDA Non Migas. PNBP SDA Non Migas (terutama batubara dan nikel) menyumbang lebih tinggi dibandingkan Migas yaitu Non Migas mencapai Rp130,97 triliun dan Migas mencapai Rp108,96 triliun. Walaupun moderasi harga terjadi pada komoditas mineral dan batubara, dampak kenaikan tarif yang diatur dalam PP 26/2022 dan PP No.15/2022 tetap dirasakan sehingga PNBP SDA Non migas ini tetap meningkat. Kenaikan PNBP SDA Migas ini tidak mendorong peningkatan PNBP SDA karena penurunan yang relatif besar di PNBP SDA Migas. Kinerja PNBP SDA Migas menunjukkan penurunan dari 136,25 triliun di 2022 menjadi Rp108,96 triliun di 2023 atau tumbuh negatif sebesar 20,03 persen (*yoy*), seiring dengan tren penurunan ICP dan lifting migas.

Pelemahan kinerja PNBP juga terjadi pada jenis PNBP Lainnya. Hingga 12 Desember 2023, penurunan tersebut mencapai Rp152,26 triliun, melambat 13,54 persen. Adapun realisasi PNBP Lainnya di tahun 2022 mencapai Rp176,10 triliun. Penurunan ini salah satunya berasal dari penurunan PNBP DMO minyak mentah dan PNBP penjualan hasil tambang akibat moderasi harga dan penurunan *lifting* minyak mentah, termasuk pengaruh dari moderasi harga batubara.

Belanja Negara dioptimalkan dalam mempertahankan daya beli masyarakat

Pengelolaan Belanja Negara dalam APBN 2023 telah menunjukkan kinerja yang resilien dan tetap terjaga dengan baik. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akselerasi belanja dan mengantisipasi perlambatan pendapatan, untuk menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta ketidakpastian ekonomi global. APBN sebagai instrumen fiskal terutama dari sisi Belanja Negara senantiasa dijaga agar tetap efektif menjalankan peran sebagai *shock absorber*. Peran APBN sebagai *shock absorber* terlihat dari berbagai kebijakan dan alokasi APBN yang ditujukan untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mengalokasikan belanja prioritas untuk penguatan produktivitas dan fondasi ekonomi nasional.

Realisasi belanja negara didukung oleh tingginya realisasi belanja modal. Realisasi Belanja Negara hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp2.588,2 triliun (terserap 83,0 persen dari pagu Perpres 75/2023). Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.840,4 triliun (terkontraksi 5,9 persen, yoy) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp747,8 triliun (tumbuh 0,6 persen, yoy). Realisasi Belanja Negara tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya realisasi belanja modal yang tumbuh 20,5 persen (yoy) untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur. Di sisi lain, realisasi belanja subsidi yang sedikit terkontraksi 1,3 persen (yoy), namun demikian Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga ketersediaan barang bersubsidi seperti BBM dan LPG Tabung 3 kg. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan komoditas di tengah tekanan kenaikan harga komoditas.

Belanja Pemerintah Pusat memberi manfaat langsung untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 12 Desember tahun 2023 mencapai Rp1.840,4 triliun atau 81,9 persen dari pagu APBN Perpres 75/2023. Jika dirinci menurut pengelompokkan Kementerian/Lembaga (K/L) atau klasifikasi Organisasi, maka realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut meliputi realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp946,1 triliun (tumbuh 0,4 persen) dan belanja non-K/L sebesar Rp894,3 triliun (terkontraksi 11,7 persen). Realisasi belanja K/L terutama untuk mendukung persiapan pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, serta penyaluran berbagai bansos. Sementara itu, peningkatan realisasi belanja non-K/L terutama untuk penyaluran subsidi dan pembayaran kompensasi BBM dan Listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.

Belanja Pegawai menjadi salah satu komponen Belanja Pemerintah Pusat yang mendukung peningkatan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tugas fungsi pelayanan publik. Sampai dengan 12 Desember 2023, realisasi mencapai Rp403,9 triliun atau tumbuh 1,0 persen

(yoy). Pertumbuhan realisasi belanja pegawai terutama didorong oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, pembayaran THR dan Gaji ke-13 di tahun 2023 juga memasukkan komponen tunjangan kinerja sebesar 50 persen. Selain itu, peningkatan realisasi belanja pegawai juga disebabkan oleh pembayaran tunjangan tenaga pendidik non PNS pada Kemenag. Pengelolaan belanja pegawai senantiasa dioptimalkan untuk mendukung tetap terjaganya tingkat daya beli masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Belanja Barang masih mengalami kontraksi. Realisasi belanja barang sampai dengan 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp347,7 triliun atau terkontraksi 4,1 persen (yoy). Terkontraksinya realisasi Belanja Barang tersebut disebabkan oleh penurunan pengelolaan dana kelapa sawit dan pembayaran klaim pasien Covid-19 pada tahun 2022. Adapun belanja barang dimanfaatkan untuk pemeliharaan/perawatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kemenhan dalam rangka mendukung penyediaan alutsista. Selain itu, pemanfaatan belanja barang juga digunakan untuk pemeliharaan/perawatan sarana prasarana sumber daya air, penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan darurat akibat bencana, dan preservasi jalan nasional pada Kemen PUPR.

Belanja Modal tahun 2023 terutama difokuskan untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur prioritas dan rehabilitasi sarana prasarana. Realisasi Belanja Modal sampai 12 Desember 2023 mencapai Rp202,6 triliun atau tumbuh 20,5 persen (*yoy*). Pertumbuhan realisasi Belanja Modal digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, SPAM, jalan, dan jembatan. Selain itu, belanja modal juga digunakan untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur bagi 42,4 ribu keluarga.

Belanja Bantuan Sosial (Bansos) merupakan instrumen penting yang menjadi bantalan bagi masyarakat miskin dan rentan. Bantuan ini penting terutama untuk mempertahankan tingkat konsumsi bagi masyarakat miskin dan rentan di tengah situasi ketidakpastian perekonomian global yang eskalatif. Sampai dengan 12 Desember 2023, realisasi Belanja Bansos mencapai Rp142,3 triliun, terkontraksi 10,0 persen (yoy). Adapun pemanfaatan realisasi Bansos antara lain digunakan untuk penyaluran bantuan PKH kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM, pembayaran bantuan premi iuran JKN bagi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi 18,3 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 791,8 ribu mahasiswa. Sementara itu, untuk menahan guncangan ekonomi akibat kenaikan harga bahan pokok, pemerintah menyalurkan Bantuan Pangan beras, telur dan daging ayam untuk 20,65 juta penerima.

Belanja negara berperan untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global, perlambatan ekonomi tiongkok dan dampak El Nino. Dampak situasi tersebut terlihat dari peningkatan volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi, suku bunga hingga pelemahan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan respons kebijakan yang ditujukan untuk melindungi daya beli dan stabilisasi ekonomi khususnya kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dalam perjalanan tahun 2023 pemerintah memberikan bantuan sosial yang spesifik mengatasi permasalahan di atas yaitu bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kedua bantuan tersebut merupakan tambahan dan pengembangan dalam APBN 2023 sebagai respons atas perkembangan situasi terkini. Bantuan beras diberikan untuk 21,3 juta KPM dengan nilai manfaat 10 kg/KPM selama 3 bulan pada tahap pertama (Maret-Mei). Pada September-November 2023 bantuan beras kembali diberikan dengan nilai bantuan dan sasaran yang sama. Dengan memperhatikan kondisi El Nino yang dihadapi, Pemerintah menetapkan kebijakan penebalan bantuan sosial yang dilaksanakan pada bulan Desember. Penyaluran bantuan beras dilakukan oleh Bapanas dengan kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun. Selain itu, pada bulan November-Desember juga diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dengan nilai bantuan Rp200ribu/bulan yang diberikan kepada 18,8 juta KPM. Bantuan tersebut diselenggarakan oleh Kemensos dengan kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Realisasi Belanja Subsidi sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Sampai dengan 12 Desember 2023 mencapai Rp203,6 triliun atau sebesar 68,2 persen dari APBN Perpres 98/2022. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi realisasi subsidi energi sebesar Rp134,6 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp69,0 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja subsidi hingga 12 Desember 2023 sedikit mengalami penurunan sebesar 1,3 persen (*yoy*) terutama karena penurunan realisasi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg seiring dengan kontraksi harga ICP, namun dari sisi volume penyaluran barang bersubsidi mengalami penurunan.

Di satu sisi, realisasi Subsidi nonenergi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Realisasi subsidi nonenergi sampai dengan 12 Desember 2023 mencapai Rp69,0 triliun atau naik 18,6 persen. Beberapa komponen subsidi nonenergi yang memengaruhi peningkatan tersebut antara lain pertumbuhan realisasi subsidi bunga kredit program yang mencapai Rp39,5 triliun atau 58,2 persen persen dari total realisasi subsidi nonenergi. Selain itu, realisasi subsidi pupuk tercatat sebesar Rp17,7 triliun.

Kinerja realisasi TKD sampai dengan 12 Desember 2023 meningkat dari periode sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi kinerja beberapa jenis dana transfer yaitu DBH, DAU, dan DAK Nonfisik. Selain itu, kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur juga mendukung penurunan realisasi TKD. Penyaluran DBH sampai dengan 12 Desember 2023 mencapai Rp118,2 triliun atau tumbuh 0,4 persen (yoy). Sementara itu, penyaluran DAU sebesar Rp371,8 (0,1 persen yoy). Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp120,7 triliun atau 6,5 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang mencapai Rp10,5 triliun atau naik 28,9 persen yoy (lebih tinggi Rp2,4 triliun). Sementara itu, jenis TKD yang mengalami penurunan realisasi adalah DAK Fisik dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Realisasi DAK Fisik sebesar Rp42,0 triliun (-7,9 persen yoy) disebabkan pagu DAK Fisik untuk Infrastruktur Publik Daerah pada tahun 2023 yang lebih kecil daripada pagu DAK Fisik tahun 2022. Akan tetapi, persentase realisasi DAK Fisik sampai 12 Desember 2023 telah mencapai 78,6 persen dari pagu APBN 2023.

Capaian anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Biaya yang dikeluarkan Pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat baik barang ataupun jasa, khususnya pada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta transfer ke daerah, mempunyai keterkaitan terhadap perekonomian melalui pengeluaran konsumsi pemerintah. Pemerintah terus mendorong akselerasi penyerapan belanja negara melalui penyelesaian berbagai kegiatan di Kementerian/Lembaga pada belanja Pemerintah Pusat serta *joint monev* Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan realisasi transfer ke daerah.

Pembiayaan anggaran menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan negara

Defisit mencatatkan penurunan. Sampai dengan 12 Desember 2023, defisit APBN tercatat sebesar Rp35,0 triliun atau 0,17 persen PDB. Besaran defisit ini turun 85,8 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan periode 12 Desember 2022 di mana defisit saat itu mencapai Rp246,6 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama tahun 2023, realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp289,6 triliun atau 60,3 persen terhadap pagu APBN 2023 berdasarkan Perpres 75/2023.

Penurunan defisit dipengaruhi meningkatnya pendapatan negara yang didorong oleh kenaikan harga komoditas serta optimalisasi belanja negara. Pendapatan negara yang terus tumbuh cukup baik di tahun 2023 menunjukkan pemulihan ekonomi yang tetap terjaga. Di sisi lain, penggunaan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun anggaran sebelumnya, atau dalam hal ini di tahun 2022 sebagai langkah antisipasi volatilitas pasar keuangan di 2023 juga sedikit banyak turut mendorong penurunan defisit. Di sisi lain, penurunan pembiayaan anggaran tahun 2023 selaras dengan komitmen Pemerintah untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB serta pengelolaan utang secara *prudent*, terukur, dan sinergis.

Realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang tercatat menurun. Sampai dengan 12 Desember 2022, realisasi pembiayaan melalui pemerbitan

utang tercatat mencapai Rp345,0 triliun, turun 36,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Penurunan tersebut terutama didorong oleh penurunan pembiayaan melalui SBN yang terkontraksi hingga 44,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Pemerintah berkomitmen bahwa pembiayaan utang akan terus dikelola dengan penuh kehati-hatian namun tetap fleksibel. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kondisi APBN, volatilitas pasar keuangan, serta optimalisasi pengelolaan Kas Negara. Penurunan utang tersebut juga menunjukkan upaya Pemerintah untuk terus menjaga sustainalilitas utang (rasio utang terhadap PDB). Indikator ini diupayakan menurun dan terus dijaga dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Selain itu, dalam pemenuhan pembiayaan APBN, Pemerintah juga senantiasa mengutamakan penerbitan SBN Domestik dalam mata uang Rupiah, optimalisasi penerbitan SBN Ritel untuk memperluas basis investor, serta pemanfaatan fleksibilitas pinjaman program (*timing* dan *size*).

Pembiayaan Investasi terutama difokuskan untuk mendorong produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan periode 12 Desember 2023, pembiayaan Investasi telah mencapai Rp73,89 triliun atau 41,91 persen dari total alokasi APBN. Sedangkan penerimaan kembali investasi mencapai Rp15,35 triliun. Pembiayaan Investasi terutama difokuskan untuk mendorong produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terutama disalurkan untuk mendukung kesinambungan pelaksanaan program-program Pemerintah yang memiliki *multiplier effect* besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi tersebut di antaranya untuk (i) Lingkungan melalui Dana Pengelolaan Lingkungan Hidup di antaranya Dana Reboisasi, Dana Bersama Penanggulangan Bencana, Dana Rehabilitasi Mangrove, Dana *Debt For Nature Swap*; (ii) Dunia melalui Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional di antaranya Bantuan Kemanusiaan, hibah pembagunan sekolah, pusat pelatihan, hingga rumah sakit; (iii) mencerdaskan bangsa melalui beasiswa, pendanaan riset, kebudayaan, serta Perguruan Tinggi; (iv) Proyek Strategis Nasional melalui LMAN di antaranya Percepatan pendanaan Pengadaan lahan yang mampu mendukung operasionalisasi 1.673 km jalan tol, 17 bendungan, 5 jalur kereta api, Pelabuhan Patimban dan Sirkuit Mandalika, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara; dan (v) Perumahan MBR melalui program FLPP yang pada tahun 2023, sampai dengan 12 Desember 2023 telah tercapai 100 persen penyaluran FLPP atau sebanyak 229.000 unit rumah FLPP bagi MBR.

TABEL 3

Realisasi APBN s.d. 12 Desember 2023

	URAIAN (triliun rupiah)	2022		2023					
		Realisasi s.d. 12 Des	Growth (%)	APBN	Perpres 75/2023	Realisasi s.d. 12 Des	% thd APBN	% thd Perpres 75/2023	Growth (%)
A.	**PENDAPATAN NEGARA**	**2.451,8**	**37,9**	**2.463,0**	**2.637,2**	**2.553,2**	**103,7**	**96,8**	**4,1**
a.l.	**I. Penerimaan Perpajakan**	**1.912,7**	**39,1**	**2.021,2**	**2.118,3**	**1.996,4**	**98,8**	**94,2**	**4,4**
	1. Penerimaan Pajak	1.622,1	43,1	1.718,0	1.818,2	1.739,8	101,3	95,7	7,3
	2. Kepabeanan dan Cukai	290,6	20,5	303,2	300,1	256,5	84,6	85,5	(11,7)
	II. PNBP	**537,7**	**34,3**	**441,4**	**515,8**	**554,5**	**125,6**	**107,5**	**3,1**
B.	**BELANJA NEGARA**	**2.698,4**	**12,4**	**3.061,2**	**3.117,2**	**2.588,2**	**84,5**	**83,0**	**(4,1)**
	I. Belanja Negara	**1.955,2**	**16,9**	**2.246,5**	**2.302,5**	**1.840,4**	**81,9**	**79,9**	**(5,9)**
	1. Belanja K/L	942,7	(5,9)	1.000,8	1.000,8	946,1	94,5	94,5	0,4
	2. Belanja non-K/L	1.012,4	51,1	1.245,6	1.301,6	894,3	71,8	68,7	(11,7)
	II. Transfer ke Daerah	**743,2**	**2,1**	**814,7**	**814,7**	**747,8**	**91,8**	**91,8**	**0,6**
C.	**KESEIMBANGAN PRIMER**	**120,1**	**(141,2)**	**(156,8)**	**(38,5)**	**378,6**	**(241,5)**	**(982,8)**	**215,2**
D.	**SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN**	**(246,6)**	**(60,4)**	**(598,2)**	**(479,9)**	**(35,0)**	**5,9**	**7,3**	**(85,8)**
	% thd PDB	***-1,26***		***-2,84***	***-2,27***	***-0,17***			
E.	**PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**473,7**	**(27,8)**	**598,2**	**479,9**	**289,6**	**48,4**	**60,3**	**(38,9)**

Sumber: Kementerian Keuangan

BAGIAN II

ULASAN KHUSUS:

- Gejolak Pasar Keuangan Global dan Efeknya Terhadap Sektor Keuangan Indonesia
- Perekonomian Tiongkok di Tengah Pusaran Geofragmentasi Dunia

transjakarta
JakLingko

Gejolak Pasar Keuangan Global dan Efeknya terhadap Sektor Keuangan Indonesia

Pengetatan kebijakan moneter global masih berlangsung

Hampir selama satu setengah tahun terakhir perekonomian global diwarnai kebijakan moneter ketat, ditandai dengan kenaikan suku bunga acuan (*policy rate*) yang relatif tinggi. Awal mula tren kenaikan suku bunga tersebut terutama dipicu oleh peningkatan laju inflasi yang tinggi di berbagai negara sebagai akibat dari pandemi. Berakhirnya masa pandemi telah mendorong kenaikan *demand* masyarakat namun kurang dapat diimbangi dari sisi pasokan akibat belum pulihnya kegiatan produksi. Kesenjangan tersebut telah mendorong peningkatan inflasi global. Di sisi lain, munculnya perang Ukraina dan Rusia memperdalam disrupsi rantai pasok global sehingga menjadi faktor tambahan bagi peningkatan inflasi. Inflasi yang tinggi berlangsung cukup lama dan melanda banyak negara. Merespons tekanan inflasi tersebut, tingkat suku bunga acuan di perekonomian dunia secara umum mulai dinaikkan pada triwulan II 2022. Seiring berjalannya waktu, kebijakan moneter ketat terus berlangsung dan inflasi di sejumlah negara mulai mengalami penurunan. Namun demikian, penurunan yang terjadi dipandang relatif lambat dan masih belum mencapai sasaran sehingga suku bunga acuan tetap dipertahankan di tingkat yang tinggi hingga menjelang berakhirnya tahun 2023.

GRAFIK 28

Perkembangan inflasi di mancanegara

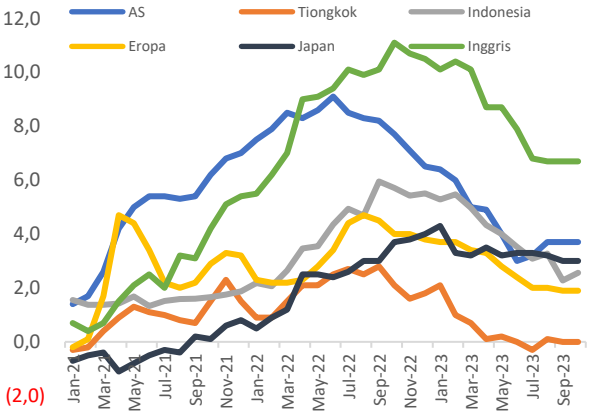

Sumber: Bloomberg, diolah

Tingginya suku bunga yang terjadi di berbagai negara telah memengaruhi dinamika pasar keuangan, termasuk arus modal antarnegara, instrumen investasi portofolio, dan pada akhirnya

GRAFIK 29

Suku bunga acuan mancanegara (%)

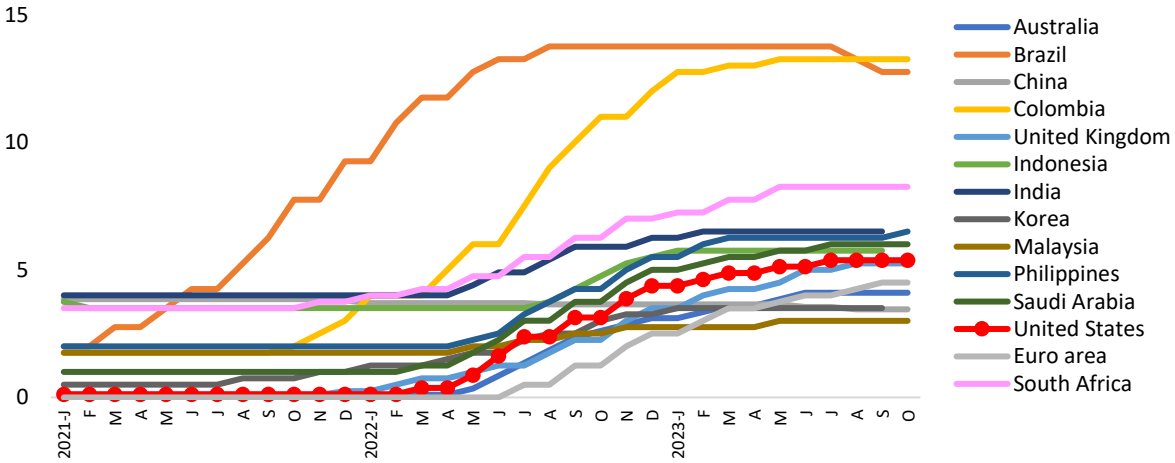

Sumber: Bloomberg

turut memberikan tekanan pada nilai tukar global terutama EMs. Suku bunga yang tinggi di negara-negara maju, khususnya AS, telah mendorong preferensi investor global untuk memindahkan dananya ke pasar negara maju. Sebagaimana lazimnya *appetite global investor* pada masa yang penuh ketidakpastian, investasi di negara maju dipandang sebagai *safe haven asset*, terlebih saat ini dengan penawaran tingkat imbal hasil yang lebih menarik. Situasi tersebut menyebabkan tekanan instrumen portofolio dan nilai tukar EMs dan memaksa kelompok negara tersebut untuk ikut menaikkan suku bunga acuannya demi menahan *outflow* investor global dan menstabilkan nilai tukar.

Kebijakan moneter Indonesia di tengah dinamika sektor keuangan global

Sebagai *small open economy*, Indonesia tidak terlepas pada risiko tekanan *outflow* mengingat 43,22 persen portofolio di pasar saham dan 14,89 persen portofolio di pasar SBN dimiliki oleh investor global (data per November 2023). Pada pertengahan semester I 2022, tren kenaikan suku bunga acuan terutama AS mulai menimbulkan tekanan *outflow* dan berdampak pada Rupiah di tengah dukungan *supply* valas dari neraca perdagangan yang semakin terbatas. Tekanan tercermin antara lain pada pergerakan nonresiden yang membukukan *outflow*, baik dari sisi pasar saham maupun pasar obligasi. Peningkatan suku bunga di luar negeri tersebut mendorong terjadinya *capital outflow* yang didorong oleh *overweight* investor pada *safe haven assets*. Pada periode tersebut, BI berupaya meredam tekanan Rupiah dengan penggunaan cadangan devisa, sementara suku bunga acuan BI-7DRR masih dipertahankan pada tingkat 3,5 persen untuk tetap memberi stimulus bagi pemulihan ekonomi dan sektor riil yang tengah berlangsung. Sementara itu, tingkat inflasi domestik mulai meningkat, meskipun masih berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan.

Memasuki semester II 2022, strategi kenaikan suku bunga acuan mulai diimplementasikan oleh Bank Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan untuk memitigasi risiko tekanan inflasi global pada domestik yang mulai dirasakan, *imported inflation* mulai berdampak pada kenaikan harga BBM nonsubsidi dalam negeri. Pada gilirannya, kenaikan harga BBM mendorong inflasi bergerak di atas sasarannya. Di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan juga ditempuh Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah agar tetap sejalan dengan nilai fundamentalnya. Pada periode tersebut, tekanan nilai tukar semakin meningkat, antara lain dipengaruhi *spread* antara FFR dan 7DRR yang semakin menyempit. Di sisi lain, cadangan devisa yang digunakan untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah semakin menurun. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, suku bunga acuan 7DRR mulai dinaikkan secara bertahap hingga akhir Januari 2023 pada tingkat 5,75 persen.

GRAFIK 30
Inflasi dan 7DRR

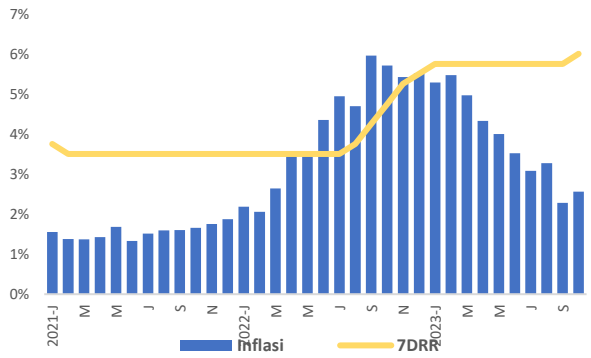

Sumber: BI dan BPS, diolah

Selanjutnya, BI-7DRR dipertahankan pada level tersebut mempertimbangkan tingkat inflasi domestik yang mereda. Demikian halnya dengan kinerja ekonomi dan sektor riil yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Perkembangan positif tersebut membangun kembali kepercayaan investor global. Aliran modal investor global kembali masuk pada pasar modal domestik dan menyokong penguatan nilai tukar Rupiah di semester I 2023. Namun demikian, memasuki semester II, nilai tukar Rupiah kembali mengalami tren depresiasi, antara lain dipengaruhi *spread* tingkat bunga antara 7DRR dengan FFR yang semakin kecil, di samping tren penurunan cadangan devisa. Per Oktober 2023, Bank

Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan ke level 6,00 persen mempertimbangkan dinamika pasar yang terjadi. Bank Indonesia berupaya memperkuat kebijakan untuk stabilisasi Rupiah di tengah tekanan pasar keuangan global yang kembali meningkat pada saat itu. Di sisi lain, Bank Indonesia juga berupaya *pre-emptive* dan *forward looking* terhadap risiko *imported inflation*, terutama akibat tekanan harga energi dan pangan.

GRAFIK 31

Perkembangan FFR, BI-7DRR, dan rupiah

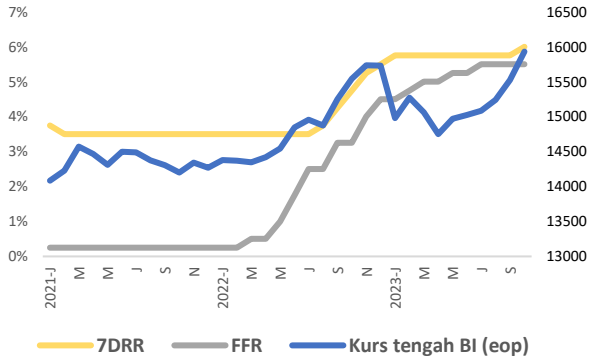

Sumber: BI dan BPS, diolah

Kondisi pengetatan moneter yang terjadi tentu berpengaruh terhadap situasi pasar keuangan di Indonesia, terutama pada industri perbankan, pasar saham, dan pasar obligasi.

Dampak pengetatan moneter terhadap pasar keuangan di Indonesia dari sisi perbankan

Dampak dari pengetatan moneter terutama terlihat dari peningkatan suku bunga dan likuiditas di dalam negeri yang relatif menurun. Rasio uang beredar terhadap PDB (nominal, 4 kuartal) tercatat mengalami penurunan selama 2022 hingga 2023. Tingginya suku bunga di pasar telah menurunkan jumlah uang beredar yang dapat diartikan likuiditas di perekonomian semakin menurun. Sementara itu, pertumbuhan DPK mengalami penurunan yang antara lain disebabkan adanya pergeseran instrumen investasi dan efek normalisasi harga komoditas bagi korporasi. Di samping penurunan likuiditas di pasar, pertumbuhan kredit perbankan juga menunjukkan tren perlambatan, khususnya di tahun 2023 yang diperkirakan turut dipengaruhi semakin tingginya *cost of fund*. Hal tersebut tentu dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi pascapandemi yang sedang berlangsung. Untuk itu, Bank Indonesia turut mengimplementasikan langkah pelonggaran makroprudensial melalui insentif bagi penyaluran kredit pada sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas. Strategi kebijakan tersebut mampu menopang pertumbuhan kredit untuk tidak jatuh lebih dalam dan masih lebih tinggi dari pertumbuhan sumber pendanaannya.

GRAFIK 32

Perkembangan M2 terhadap PDB (M2/PDB)

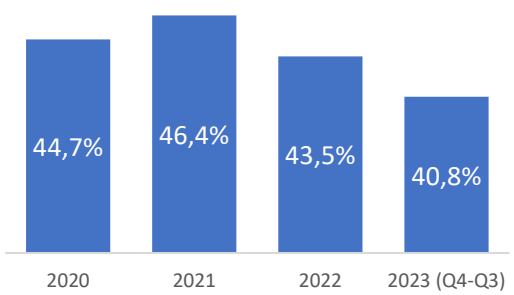

Sumber: BI, diolah

GRAFIK 33

Total kredit dan DPK (yoy)

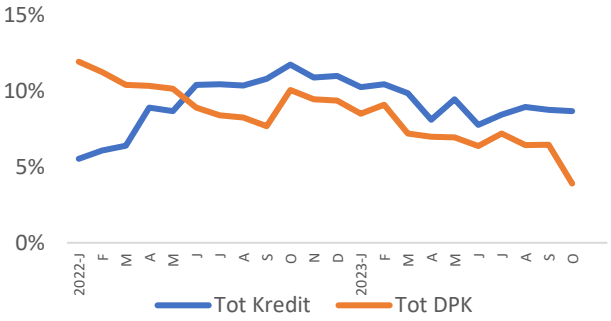

Sumber: Bank Indonesia

Dampak pengetatan moneter terhadap pasar keuangan di Indonesia dari sisi pasar saham

Tingginya suku bunga di berbagai negara berdampak negatif pada kinerja sektor riil dan berimplikasi pada prospek pasar saham global.

GRAFIK 34

IHSG dan NFB saham

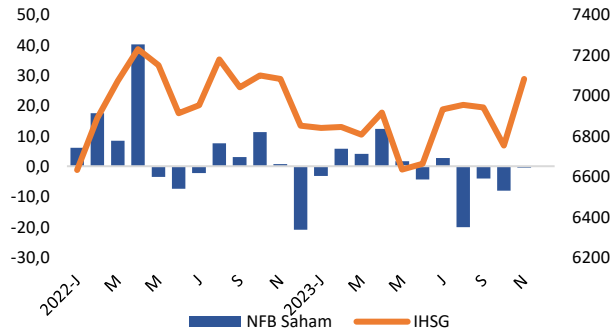

Sumber: CEIC, diolah

Kondisi yang kurang menguntungkan tersebut juga mendorong preferensi pemilik modal global untuk memindahkan dananya ke *safe haven assets* yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Situasi serupa juga terjadi di Indonesia, terutama pada periode semester II hingga penghujung 2023. IHSG mengalami tren penurunan dan baru kembali meningkat di akhir 2023 ditopang kinerja ekonomi yang masih cukup kuat dibandingkan negara lain. Secara umum, hingga November 2023, telah terjadi *capital outflow* sebesar Rp13,9 triliun. Di tengah tekanan jual investor nonresiden, pasar saham domestik masih mendapatkan *support* dari investor domestik. Hal ini terindikasi dari porsi kepemilikan asing yang mengalami penurunan pada periode yang sama. Di sisi lain IPO di pasar saham masih menarik.

GRAFIK 35
Emiten IPO

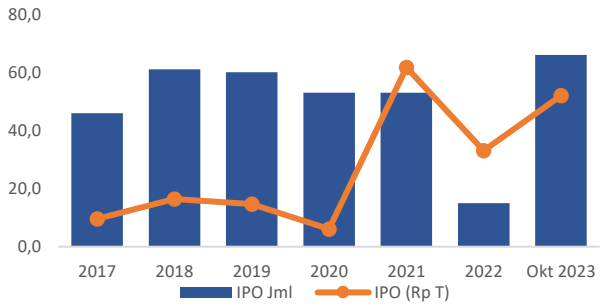

Sumber: OJK, diolah

Dampak pengetatan moneter terhadap pasar keuangan di Indonesia dari sisi *yield* obligasi

Di pasar obligasi, khususnya SBN, pergerakan *yield* juga dipengaruhi suku bunga FFR dan *yield* UST *bill* di AS. Ekspektasi terhadap *high for longer* ditambah kebutuhan penerbitan surat utang Pemerintah AS yang cukup tinggi di tengah terbatasnya ruang fiskal mendorong kenaikan *yield* UST. Kenaikan tersebut pada gilirannya mendorong kenaikan *yield* obligasi negara lain, termasuk SBN. Namun demikian, tren kenaikan *yield* di Indonesia relatif lebih *mild* dibandingkan kenaikan *yield* UST. Hal tersebut antara lain dipengaruhi kebijakan Pemerintah untuk mengurangi utang dan mengembalikan defisit fiskal ke bawah 3,0 persen per PDB. Bila disimak lebih detail, *spread* antara *yield* UST dan SBN juga telah menurun dari 4,66 persen di awal 2022 ke tingkat 2,30 persen di November 2023. Hal ini juga mengindikasikan kepercayaan pasar terhadap SBN dan pengelolaan fiskal di domestik yang cukup baik. Dengan perkembangan tersebut, pada November 2023, tercatat *capital inflow* sebesar Rp23,5 triliun, setelah sebelumnya mengalami *capital outflow* dalam 3 bulan berturut-turut dipicu peningkatan tekanan di pasar keuangan global. Fundamental ekonomi domestik yang terus membaik menjadi salah satu faktor pendorong *capital inflow* dan penurunan *yield* obligasi.

GRAFIK 36
Yield SBN dan FFR

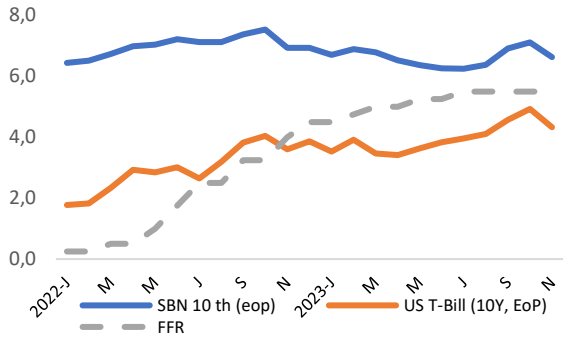

Sumber: CEIC, diolah

Dampak pengetatan moneter terhadap pasar keuangan di Indonesia dari sisi NFB

Dinamika perkembangan ekonomi dan keuangan global turut memengaruhi aliran dana di pasar keuangan, termasuk Indonesia. Kebijakan moneter negara-negara maju dalam menghadapi inflasi yang masih berada di level tinggi turut mewarnai volatilitas tekanan pada EMs. Kebijakan suku bunga acuan yang terus dipertahankan tinggi untuk turut mengimbangi inflasi yang juga belum kembali ke level sebelum pandemi membuat ekonomi dunia masih dihantui ketidakpastian. Hal ini turut memengaruhi dinamika *capital flow* di pasar saham dan pasar obligasi domestik. Sampai dengan akhir November 2023, berlanjut hingga pertengahan Desember 2023, tercatat masih

GRAFIK 37
Perkembangan yield SBN dan SUN (NFB)

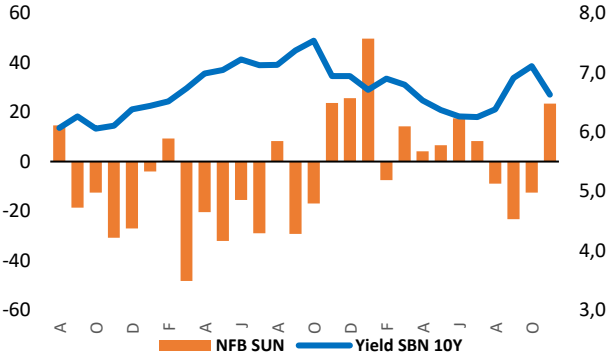

Sumber: CEIC, diolah

terjadi *net foreign buy* secara kumulatif di pasar keuangan domestik.

GRAFIK 38
Perkembangan saham dan SBN

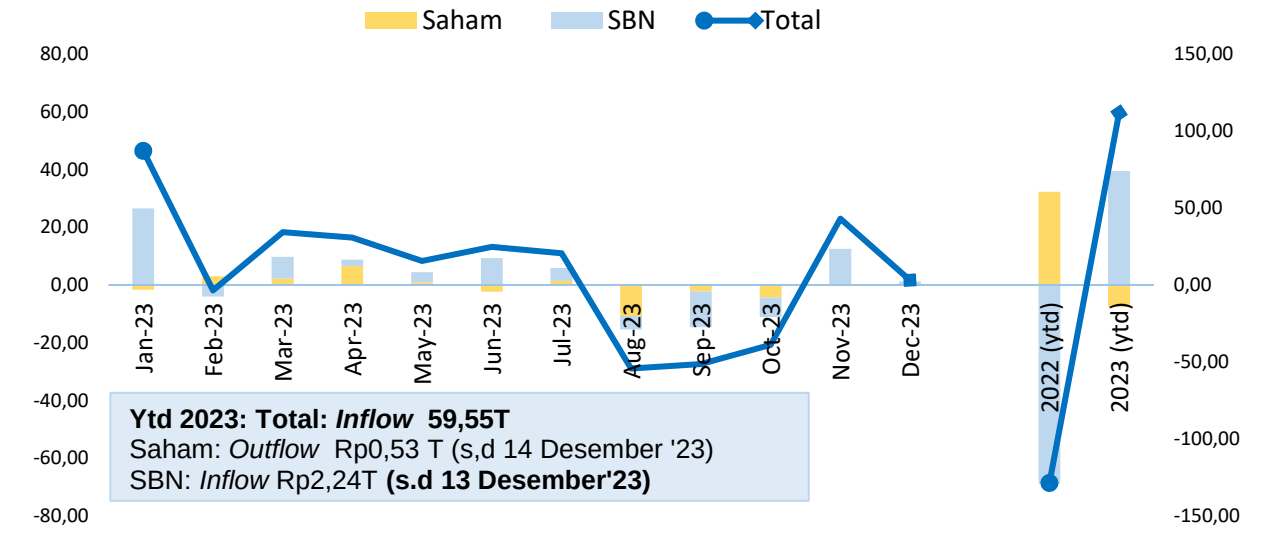

Sumber: Bloomberg, diolah

Dinamika sektor keuangan global yang masih berlangsung tentunya memberikan tantangan bagi ekonomi Indonesia. Perkembangan tren moneter global juga mengindikasikan masih akan berlanjutnya strategi kebijakan moneter ketat yang lebih lama *(high for longer)*. Untuk itu, Pemerintah terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga stabilitas *(pro-stability)*, sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan *(pro-growth)*.

Perekonomian Tiongkok di Tengah Pusaran Geofragmentasi Dunia

Jejak ekonomi dan pembangunan Tiongkok

Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah mengalami metamorfosis ekonomi dari sebuah perekonomian yang direncanakan secara terpusat (*centrally-planned*) menjadi perekonomian berorientasi pasar *(market-based)* yang besar dan dinamis. Evolusi ini tidak hanya mendorong Tiongkok untuk menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia tetapi juga turut merekonfigurasi lanskap perekonomian global. Trajektori perekonomian Tiongkok dapat memberikan wawasan tentang seluk beluk industrialisasi, kemajuan teknologi, serta kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pemahaman atas perjalanan ekonomi Tiongkok juga memberikan pelajaran berharga tentang dinamika perdagangan serta peran intervensi negara.

Tiongkok kerap diibaratkan sebagai seekor naga. Sedikit saja sang naga bergerak, ia mampu menimbulkan putaran angin yang dahsyat bagi sekitarnya. Sejarah bahkan mencatat, pergerakan Tiongkok sejak zaman pra modern selalu membawa dampak yang dramatis bagi dunia. Di era modern, Reformasi Tiongkok yang digagas Deng Xiaoping (akhir 1978 – 1989) kemudian mengubah wajah perekonomian Tiongkok di abad 21.

Reformasi Tiongkok dan kebijakan pintu terbuka dimulai dengan mengadopsi strategi pembangunan ekonomi baru pada akhir 1978. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Pemerintah Tiongkok mulai mengejar kebijakan pintu terbuka, di mana ia mengadopsi strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan terhadap modal asing dan teknologi sambil mempertahankan komitmennya terhadap sosialisme.

Tujuan utama dari perubahan kebijakan ini adalah untuk membangun kembali ekonomi dan masyarakatnya yang hancur akibat Revolusi Kebudayaan. Pergeseran kebijakan ini juga didorong oleh kenyataan bahwa pendapatan masyarakat biasa di Tiongkok saat itu sangat rendah, bahkan dibandingkan dengan pendapatan ekonomi negara Asia lainnya. Di sisi lain, Pemerintah melihat bahwa masa depan negara Tiongkok dan rezim komunis akan berada dalam bahaya, kecuali sesuatu dilakukan untuk meningkatkan standar hidup rakyatnya melalui pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah kemudian menetapkan pembukaan zona untuk menarik investasi asing, termasuk zona ekonomi khusus, kota pesisir terbuka, zona pengembangan ekonomi dan teknologi, zona terbuka delta, zona terbuka semenanjung, kota perbatasan terbuka, dan zona pengembangan industri teknologi tinggi. Pembentukan zona-zona ini terbukti mampu menarik masuk investasi asing secara besar-besaran, terutama dari perusahaan-perusahaan di Hong Kong dan Taiwan. Pada saat yang sama, Tiongkok mempromosikan konsep ekonomi pasar sosialisnya. Perubahan tersebut membawa ledakan kewirausahaan yang mengakibatkan munculnya sejumlah besar pengusaha dan bisnis ventura di Tiongkok.

GRAFIK 39

Perkembangan PDB Tiongkok

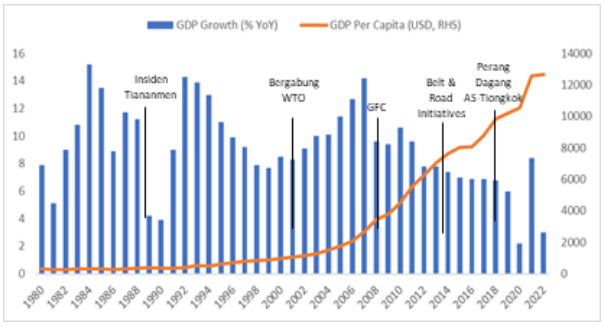

Sumber: CEIC, diolah

Modal asing, teknologi, dan masuknya pengetahuan terkait manajemen memungkinkan Tiongkok untuk mengubah sumber daya tenaga kerja dan wilayahnya yang besar menjadi pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pergeseran ke

kebijakan ekonomi pintu terbuka mengantarkan periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada paruh pertama tahun 1980-an. Ekonomi Tiongkok sempat mengalami stagnasi pasca Insiden Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, tetapi pada paruh pertama tahun 1990-an, ekonomi Tiongkok kembali melejit ke angka yang tinggi.

Kebijakan ekonomi terbuka yang dirintis Deng Xiaoping menunjukkan hasil yang dramatis pasca Tiongkok menjadi anggota ke-143 WTO di tahun 2001. Masuknya Tiongkok ke WTO membuka akses yang lebih luas ke pasar global. Di sisi lain, pemulihan hubungan ekonomi beberapa negara Asia seperti Indonesia di awal tahun 2000an juga memberi dampak positif bagi industri dan ekspor negara tirai bambu. Mimpi Deng Xiaoping untuk membawa ekonomi Tiongkok menjadi besar dan meningkatkan pendapat masyarakatnya berhasil direalisasikan. Pada periode 2001 – 2010 Tiongkok berhasil menjadi *"the world's factory"* di mana sektor manufaktur berekspansi secara signifikan, serta industrialisasi dan urbanisasi terjadi dengan masif.

Namun demikian, keajaiban pertumbuhan ekonomi Tiongkok bukan tanpa gangguan. *Global Financial Crisis* (GFC) memberikan dampak negatif bagi Tiongkok dan memicu moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada periode setelahnya. Meskipun laporan IMF menyatakan bahwa Tiongkok tidak mengalami *"credit crunch"* dan juga tidak harus menghadapi apa yang disebut sebagai *toxic securities* yang menghancurkan neraca bank di negara-negara maju, Tiongkok masih terkena dampak krisis tahap kedua: resesi global dan kontraksi perdagangan global yang pertama dalam 30 tahun. Ekspor Tiongkok – yang menyumbang lebih dari 30 persen produk domestik bruto (PDB) dan sekitar sepertiga pertumbuhan ekonomi tahunannya – anjlok pada akhir tahun 2008.

Usaha untuk mengembangkan perekonomian Tiongkok juga dilakukan melalui berbagai inisiatif ambisius seperti Belt & Road Initiatives (BRI) yang diluncurkan pada tahun 2013 serta kebijakan industrial "Made in China 2025" yang bertujuan untuk mentransformasi Tiongkok sebagai kekuatan teknologi global. BRI fokus pada proyek pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas global, khususnya di benua Asia, Eropa dan Afrika. Sementara itu, "Made in China 2025" yang diluncurkan pada tahun 2015 menekankan pengembangan sektor kunci, seperti teknologi informasi, robotik, *aerospaces*, dan kendaraan listrik, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dari teknologi asing serta mendorong inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan domestik. Sayangnya, kedua inisiatif ambisius ini tidak terlepas dari berbagai kritik dan juga tantangan dari negara mitra. Dalam berbagai diskusi pada forum dan media internasional, BRI dikritik oleh berbagai karena isu kesinambungan utang negara peminjam, implikasi geopolitik, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Di sisi lain, "Made in China 2025" menimbulkan *concerns* seputar hak properti intelektual serta *fair competitions*, dan ditengarai memicu perang teknologi / *technological decoupling* dengan Amerika Serikat.

Kondisi perekonomian Tiongkok kembali mengalami tantangan setelah pandemi Covid-19. Virus Covid-19 menyebabkan gangguan dalam produksi dan rantai pasok, karena kebijakan *lockdown* untuk mengendalikan penyebaran virus. Selanjutnya, penurunan permintaan ekspor akibat perlambatan ekonomi global serta gangguan rantai pasok global juga menimbulkan tantangan signifikan pada ekonomi Tiongkok, mengingat ketergantungannya pada perdagangan internasional.

Dinamika perekonomian Tiongkok pascapandemi Covid-19

Pascapandemi, Tiongkok kembali mengalami pemulihan ekonomi yang melemah. Pemulihan pasca Covid-19 belum optimal, dengan kinerja berbagai indikator konsumsi dan produksi masih beragam serta cenderung melambat. Sampai dengan Triwulan III tahun 2023, Tiongkok mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,9 persen yoy (dibandingkan Triwulan II sebesar 6,3 persen), dan 0,5 persen qoq, sedikit lebih rendah dari target tahunan sebesar 5 persen. Sepanjang tahun 2023, Tiongkok dihadapkan pada beberapa tantangan seperti pelemahan ekonomi setelah dicabutnya kebijakan pembatasan aktivitas Covid-19 pada Desember 2022, kondisi sektor properti yang belum membaik, lalu ditambah dengan isu deflasi, konsumsi dan investasi yang lemah, kinerja ekspor

yang menurun, utang pemerintah daerah yang tinggi, serta isu demografi, seperti penurunan populasi dan meningkatnya pengangguran usia muda.

Pelemahan konsumsi dan ekspor impor

Tiongkok tengah dihadapkan dengan masalah deflasi, yaitu kecenderungan harga-harga yang terus menurun. Konsumen membeli lebih sedikit barang khususnya barang-barang tahan lama seperti mobil dan furnitur. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2023 terus menurun menjadi -0,5 persen yoy, dimana merupakan penurunan harga terparah sejak November 2020. Indeks Harga Produsen juga terus menurun selama 14 bulan berturut-turut sampai dengan November 2023 di angka -3,0 persen yoy. Penyebab turunnya tingkat harga tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah seperti pelemahan permintaan domestik dan internasional, krisis sektor properti, serta utang pemerintah daerah yang terus menumpuk. Deflasi merupakan sinyal berlanjutnya pelemahan ekonomi Tiongkok. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, deflasi yang berlarut-larut akan berdampak secara global terutama bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada Tiongkok untuk membeli bahan baku dan negara pengekspor komoditas. Deflasi berkepanjangan memiliki dampak negatif. Harga yang rendah akan menurunkan pendapatan dan margin keuntungan dari sisi produsen, tingkat investasi menurun, dan potensi peningkatan tingkat pengangguran karena pengurangan produksi akibat penurunan permintaan.

GRAFIK 40

Perbandingan CPI & PPI Tiongkok (%yoy)

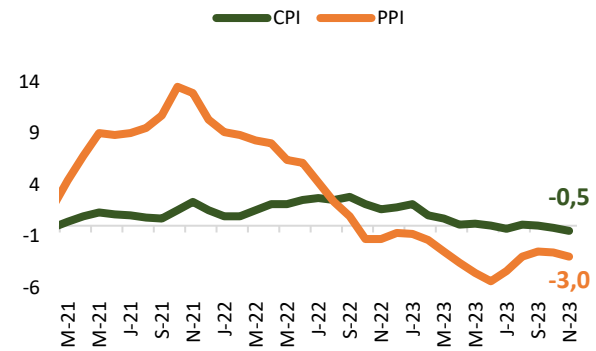

Sumber: Bloomberg

Deflasi tidak terlepas dari kepercayaan konsumen dan investor yang lemah. Konsumsi dan investasi, yang menjadi motor penggerak perekonomian Tiongkok juga mengalami perlambatan. Akibat dari pandemi Covid-19 dan respons kebijakan pemerintah Tiongkok dengan pembatasan aktivitas membuat masyarakat Tiongkok lebih berhati-hati dalam konsumsi. Selain itu, dampak dari hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat serta kondisi geopolitik global yang menyebabkan ketidakpastian untuk investor. Jumlah investasi langsung oleh perusahaan asing di Tiongkok pada triwulan ketiga (berdasarkan *preliminary data)* mencatatkan *outflow* sebesar USD11,8 miliar, dimana merupakan arus keluar pertama kalinya sejak tahun 1998. Pemerintah Tiongkok sejak awal tahun 2023 juga sudah berkomitmen untuk mengeluarkan stimulus untuk meningkatkan konsumsi guna memperbaiki perekonomian pasca kebijakan *reopening*. Stimulus tersebut mayoritas berupa subsidi untuk pembelian barang (seperti kendaraan bermotor) serta insentif perpajakan. Pemerintah Tiongkok tidak memberikan *direct cash* ke masyarakat serta masih ada tantangan dengan pembayaran cicilan properti yang mengurangi konsumsi rumah tangga. Data penjualan ritel untuk bulan November 2023 menunjukkan ada peningkatan ke level 10,1 persen, dibawah ekspektasi pasar sebesar 12,5 persen. Peningkatan dipicu terutama oleh *base effect* yang rendah pada tahun 2022 ketika pembatasan aktivitas yang berdampak pada kegiatan konsumsi dan bisnis.

GRAFIK 41

Penjualan ritel Tiongkok (%yoy)

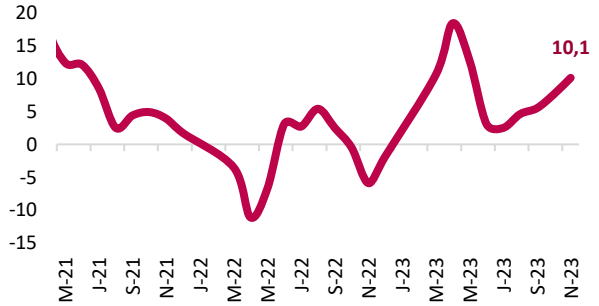

Sumber: Bloomberg

Ekspor dan impor Tiongkok juga masih menunjukkan pelemahan yang didorong pelemahan permintaan global. Ekspor untuk bulan November 2023 sedikit meningkat 0,5 persen yoy menjadi USD292 miliar, dimana merupakan peningkatan pertama kalinya sejak April.

Sedangkan impor masih lemah dengan pertumbuhan -0,6 persen menjadi $224 miliar. Total surplus perdagangan menjadi $68,4 miliar Penurunan tersebut mencerminkan lemahnya permintaan global yang menambah tekanan pada perlambatan perekonomian Tiongkok. Permintaan global cenderung melemah setelah The Fed dan beberapa Bank Sentral di Eropa dan Asia mulai menaikkan suku bunga tahun untuk meredakan tekanan inflasi.

GRAFIK 42

Ekspor dan impor Tiongkok (%yoy)

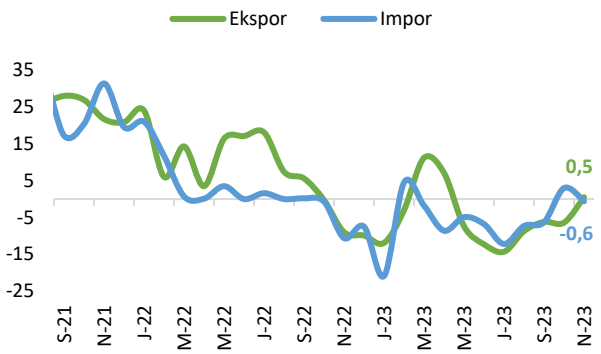

Sumber: Bloomberg

Krisis sektor properti di Tiongkok

Sektor properti, yang dulunya menjadi kontributor signifikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, kini menjadi salah satu faktor risiko perekonomian Tiongkok. Sejak tahun 2020, sektor properti yang telah mengalami *booming* selama sekitar dua dekade ke belakang akhirnya mengalami perlambatan. *Lockdown* selama pandemi telah menurunkan penjualan properti, di mana pada tahun 2022 penjualan properti baru turun tajam baik untuk bangunan residensial maupun komersial. Pelemahan permintaan terhadap properti telah memicu situasi likuiditas yang ketat bagi para pengembang properti, sehingga menyebabkan banyak developer mengalami kesulitan likuiditas dan gagal dalam menyelesaikan proyeknya. Situasi ini selanjutnya mendorong penurunan kepercayaan konsumen pada sektor properti. Pada tahun 2021 salah satu perusahaan properti besar di Tiongkok, Evergrande mengalami gagal bayar (*default*) yang memicu protes publik terhadap skandal bisnis properti dan semakin memperburuk krisis sektor properti. Pada tahun 2023 satu *developer* besar Tiongkok yang lain, yaitu Country Garden juga gagal memenuhi kewajiban utangnya, menyusul Evergrande yang pada bulan Agustus mengajukan *bankcruptcy* di Amerika Serikat.

Untuk mengatasi situasi krisis properti ini, pemerintah Tiongkok telah menggulirkan berbagai stimulus, termasuk dengan menurunkan suku bunga *mortgage* dan pinjaman preferensial untuk pembelian rumah pertama di kota-kota besar. Namun demikian, banyak ahli berpendapat bahwa dibutuhkan paket dukungan yang jauh lebih besar untuk memulihkan kepercayaan konsumen pada sektor properti ini. Kondisi pemulihan ekonomi pasca kebijakan *reopening* yang tidak sesuai ekspektasi juga memperparah kondisi tersebut.

GRAFIK 43

Perkembangan sektor properti Tiongkok (%)

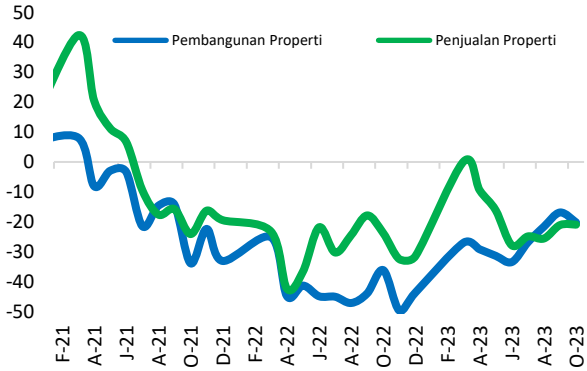

Sumber: Bloomberg

Sampai dengan saat ini, sektor properti di Tiongkok juga belum menunjukan perkembangan yang positif. Baik pembangunan dan penjualan properti masih tumbuh negatif sampai dengan Oktober 2023 yang lalu.

Risiko utang pemerintah daerah

Risiko utang yang besar tidak hanya datang dari sektor properti, tetapi juga dari pemerintah provinsi di Tiongkok. Pembangunan infrastruktur skala besar di beberapa provinsi guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menurunkan tingkat kemiskinan sebagai bentuk *spillover effect*, dilakukan dengan menggunakan biaya yang sangat besar. Biaya tersebut didapatkan sebagian besar dari pinjaman oleh pemerintah provinsi. Besarnya jumlah pinjaman yang dikumpulkan oleh provinsi-provinsi di Tiongkok sebagian besar dilakukan melalui *Local Government Financing Vehicles* (LGFVs). Total utang pemerintah provinsi-provinsi tersebut sebagian besar melebihi dari batas aman global yaitu 60

persen terhadap pendapatan. Untuk membayar pinjaman tersebut, pemerintah provinsi mengandalkan pendapatan asli provinsi, dimana 40 persen bersumber dari hasil penjualan lahan. Namun, sejak pandemi Covid-19, hasil penjualan lahan merosot tajam. Ditambah dengan lonjakan belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19. Kemudian, dengan banyaknya pembayaran utang jatuh tempo pada tahun 2023 dan 2024, serta perlambatan ekonomi pasca Covid-19, tekanan untuk pemerintah provinsi semakin meningkat. Pemerintah pusat serta Bank Sentral telah melakukan asesmen untuk mencari beberapa cara terbaik, seperti menjual aset, memperpanjang jatuh tempo pinjaman, memotong suku bunga, atau dana pemerintah pusat dengan memperlebar defisit.

Isu demografi dan tren perlambatan populasi

Isu demografi Tiongkok juga menjadi perhatian saat ini karena sejak tahun 2022 Tiongkok mengalami *negative growth* yang sebelumnya didahului oleh perlambatan populasi. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok di masa depan. Proporsi penduduk usia muda sebagai kontributor perekonomian akan menurun, dan memberikan tekanan kepada pemerintah dan anggaran khususnya untuk *social security*. Selain itu, Tiongkok dikhawatirkan akan masuk dalam *middle income trap* akibat perubahan struktur demografi. Keunggulan komparatif Tiongkok berupa tenaga kerja juga berpotensi mendisrupsi pertumbuhan jangka panjang. Penyebab krisis populasi Tiongkok tidak terlepas dari kebijakan satu anak selama beberapa dekade yang secara signifikan menurunkan angka kelahiran. Efek utama dari kebijakan tersebut adalah populasi tidak lagi mencerminkan distribusi usia standar atau "piramida populasi". Selain itu, kebijakan *zero Covid-19* yang ketat menyebabkan percepatan penurunan angka kelahiran karena pasangan menunda atau memutuskan untuk tidak memiliki anak untuk menghindari dampak dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi setelah *reopening* juga menyebabkan peningkatan pengangguran usia muda. Saat ini, pasar tenaga kerja Tiongkok didominasi oleh suplai tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Namun, kondisi ekonomi menimbulkan *mismatch* antara tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.

GRAFIK 44

Pertumbuhan populasi Tiongkok (%)

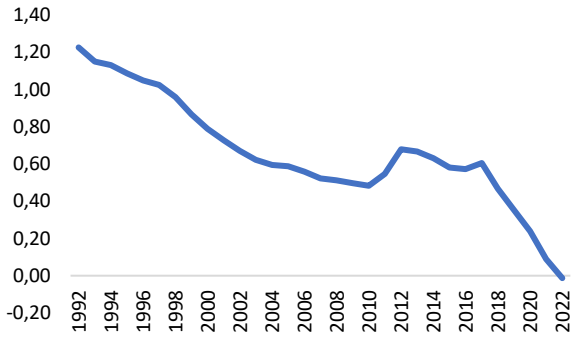

Sumber: CEIC

GRAFIK 45

Pengangguran usia muda Tiongkok (% *youth labor force age* 15-24)

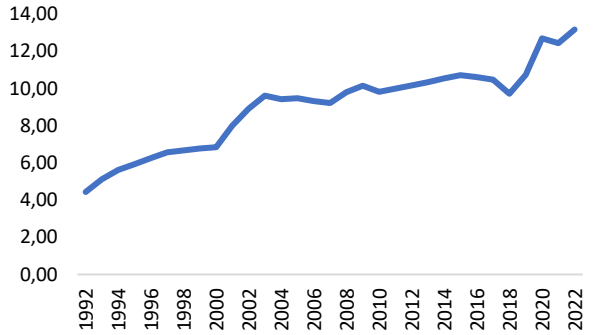

Sumber: CEIC

Kilas balik perjalanan ekonomi Tiongkok pada ulasan khusus ini memberikan gambaran berbagai reformasi struktural yang mentransformasi perekonomian. Berbagai inisiatif seperti pembentukan Zona Ekonomi Khusus, bergabung ke WTO, hingga inisiatif ambisius seperti Belt & Road Initiatives dan Made in China 2025 telah mengantarnya sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia saat ini yang memiliki pengaruh signifikan pada perekonomian global. Namun demikian, perjalanan ekonomi Tiongkok juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, terutama yang berasal dari *Global Financial Crisis* dan Pandemi Covid-19. Saat ini, Tiongkok juga sedang berada di persimpangan jalan penting yang menghadapkannya dengan tantangan yang muncul dari peningkatan tensi perdagangan dengan AS, pergeseran demografi, serta isu sektor properti yang membayangi prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Situasi yang dihadapi Tiongkok menggambarkan kompleksitas perjalanan sebuah

negara yang berusaha lepas dari jebakan kelas menengah dan menjadi negara maju di era kontemporer. Dalam menavigasi kompleksitas ini, diperlukan respons kebijakan yang tepat, inovasi yang berkelanjutan, serta komitmen untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan dinamika sosial dan lingkungan yang menyertai.

BAGIAN III

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TERKINI

MASKER
15.000

Perkembangan Kebijakan Terkini

Kebijakan fiskal

A. Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 3/PMK.07/2023

Tanggal: 17 Januari 2023 (Bn Tahun 2023 No. 78)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun sebagai tindak lanjut penetapan atas persetujuan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan. Dalam peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang rincian besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp5.470.207.767.000,00 menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2023.

B. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 14/PMK.7/2023 (Perubahan atas Permenkeu 198/PMK.07/2021)

Tanggal: 28 Februari 2023 (Bn Tahun 2023 No. 193)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun untuk meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus fisik, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus fisik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Dalam PMK ini mengubah beberapa ketentuan pada pasal 3 mengenai Pejabat Perbendaharaan Negara Pegelolaan DAK Fisik, dan menghapus beberapa ketentuan ayat pada pasal 27 khususnya terkait kewenangan K/L dalam menetapkan petunjuk operasional DAK fisik.

C. Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 15/PMK.03/2023 (Perubahan atas Permenkeu 96/PMK.03/2021)

Tanggal: 28 Februari 2023 (Bn Tahun 2023 No. 194)

Peraturan Menteri Keuangan ini mengubah beberapa ketentuan, di antaranya terkait informasi permohonan SKB PPnBM, penelitian administrasi terhadap SKB PPnBM yang diajukan, tata cara apabila laman DJP belum tersedia atau tidak dapat diakses, ketentuan apabila terjadi kesalahan tulis/hitung dalam penerbitan SKB PPnBM, penerbitan surat keterangan pembatalan SKB PPnBM, pendelegasian kewenangan Dirjen Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, serta mengubah lampiran dalam PMK.

D. Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 18/PMK.07/2023

Tanggal: 28 Februari 2023 (Bn Tahun 2022 No. 197)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

E. Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 22 Tahun 2023

Tanggal: 13 Maret 2023 (Bn Tahun 2023 No. 239)

Bahwa untuk lebih meningkatkan daya saing, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan serta memberikan hasil tembakau pada skala industri kecil dan industri menengah serta usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan penggantian Peraturan Menteri Keuangan nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau.

F. Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Frit Dan Glasir Atau Preparat Semacam Itu Serta Frit Kaca Dan Kaca Lainnya Dari Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 32 Tahun 2023

Tanggal: 20 Maret 2023 (Bn Tahun 2023 No. 271)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur: Terhadap impor produk berupa: 1. Frit dan glasir atau preparate semacam itu yang dapat di vitrifikasi yang digunakan dalam industri keramik selain engobes (slip), dalam bentuk bubuk, butiran, serpih, atau cairan yang termasuk dalam pos tarif ex3207.20.90; dan 2. Frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran, atau serpih yang termasuk dalam pos tarif 3207.40.00 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan Bea Masuk Antidumping.

G. Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 34 Tahun 2023

Tanggal: 24 Maret 2023 (Bn Tahun 2023 No. 272)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur bahwa penjaminan Penyelenggaraan CPP adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Penjaminan penyelenggaraan CPP diberikan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut: a. kebutuhan riil pendanaan penyelenggaraan (CPP), b. kesinambungan fiskal, dan c. pengelolaan risiko fiskal (APBN).

H. Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) Untuk Jepang

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 36 Tahun 2023

(Perubahan atas Permenkeu Nomor 225 /PMK.010/2022)

Tanggal: 28 Maret 2023 (Bn Tahun 2023 No. 286)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi penetapan tarif bea masuk dalam rangka *regional comprehensive economic partnership agreement* (persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional) untuk Jepang dalam rangka fasilitasi importasi barang dari Jepang serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa.

I. Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) Untuk Republik Korea

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 37 Tahun 2023

Perubahan atas Permenkeu Nomor 223/PMK.010/2022

Tanggal: 28 Maret 2023 (Bn Tahun 2023 No. 287)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi penetapan tarif bea masuk dalam rangka Regional *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Korea dalam rangka fasilitasi importasi barang dari Republik Korea

serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa.

J. Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 38 Tahun 2023

Tanggal: 28 Maret 2023 (Bn Tahun 2023 No. 288)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan peralihan dan penggunaan energi fosil ke energi listrik dan meningkatkan minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Bus Tertentu yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

K. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Tanggal: 31 Maret 2023 (Ln Tahun 2023 No. 41)

Dalam rangka memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, Presiden sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022.

L. Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Rumah Pekerja Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 60 Tahun 2023

Tanggal: 9 Juni 2023 (Bn Tahun 2023 No. 445)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.

M. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 71 Tahun 2023

Tanggal: 12 Juli 2023 (Bn Tahun 2023 No. 539)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun dalam rangka mendorong penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri serta mendukung kebijakan hilirisasi industri mineral logam berupa komoditas tembaga, besi, timbal, dan seng.

N. Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Peraturan: Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2023

Tanggal: 12 Juli 2023 (Ln Tahun 2023 No. 94)

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, perlu dilakukan melalui mekanisme terpadu antarlembaga atas pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor

yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia.

O. Pengelolaan Transfer ke Daerah

Peraturan: Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2023

Tanggal: 24 Juli 2023 (Bn Tahun 2023 No. 100)

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.Dalam PP ini mengatur mengenai pengertian secara umum, pengalokasian, perencanaan dan penganggaran mengenai Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Desa. Kemudian diatur juga mengenai transfer ke daerah untuk daerah persiapan, daerah baru, penyaluran transfer ke daerah, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi dan pengawasan.

P. Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Sistem Keuangan Indonesia

Peraturan: KMK RI Nomor 272 Tahun 2023

Tanggal: 27 Juli 2023

Keputusan Menteri Keuangan ini disusun dalam rangka untuk mengatur mekanisme pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Q. Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan: Peraturan Presiden 48 Tahun 2023

Tanggal: 4 Agustus 2023 (Ln Tahun 2023 No. 104)

Perpres ini disusun menimbang bahwa status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan berakhir dan status factual COVID-19 telah berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia, sehingga perlu dilakukan pengaturan pengakhiran penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang dilakukan pada masa pandemi.

R. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Peraturan: KMK RI Nomor 272 Tahun 2023

Tanggal: 8 September 2023

Keputusan Menteri Keuangan ini disusun dalam rangka bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

S. Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

Peraturan: PMK RI Nomor 96 Tahun 2023

Tanggal: 15 September 2023 (Bn Tahun 2023 No. 740)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kepastian dalam berusaha, meningkatkan kecepatan pelayanan, efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan, serta akurasi data atas impor dan ekspor barang kiriman.

T. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan: PMK RI Nomor 98 Tahun 2023

Tanggal: 22 September 2023 (Bn Tahun 2023 No. 759)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan penghentian dan/ atau penundaan penyaluran dana desa. Beberapa ketentuan yang diubah dalam

PMK ini adalah meliputi ketentuan penghitungan rincian dana desa, tata cara penghitungan tambahan dana desa, kategori kinerja keuangan dan pembangunan desa, dan kategori penghargaan desa, ketentuan penyaluran dana desa non BLT.

U. Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangkan Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan

Peraturan: PMK RI Nomor 103 Tahun 2023

Tanggal: 4 Oktober 2023 (Bn Tahun 2023 No. 798)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun dalam rangka mewujudkan transisi energi yang berkeadilan dan terjangkau serta mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional. Dalam PMK ini diatur ketentuan mengenai Sumber Pendanaan Platform Transisi Energi, Kriteria Pemanfaatan Platform Transisi Energi, Pengelolaan Platform Transisi Energi, tugas dan wewenang komite pengarah, kerja sama pendanaan, dan pelaporan.

V. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Peraturan: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023

Tanggal: 16 Oktober 2023 (Ln Tahun 2023 No. 140)

Undang-Undang ini disusun sebagai bentuk sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai besaran penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam postur APBN 2024 dan jugat termasuk juga di dalamnya ketentuan terkait pelaksanaan APBN 2024.

W. Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023

Peraturan: PMK Nomor 116 Tahun 2023, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023

Tanggal: 9 November 2023 (Bn Tahun 2023 No. 918)

PMK ini disusun dalam rangka bahwa untuk mendukung percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik dan meningkatkan minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai guna mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dalam peraturan ini diatur mengenai mengenai pemberian kemudahan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai melalui mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

X. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

Peraturan: Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023

Tanggal: 10 November 2023 (Ln Tahun 2023 No. 148)

Peraturan ini disusun bahwa untuk melakukan penyesuaian pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran termasuk penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai kesimpulan rapat kerja antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Y. Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023

Peraturan: PMK Nomor 120 Tahun 2023

Tanggal: 21 November 2023 (Bn Tahun 2023 No. 917)

PMK ini disusun dalam rangka mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat, perlu diberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah.

Kebijakan moneter dan sektor keuangan

A. Peraturan Pelaksanaan Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Dan Inklusif (PADG Perubahan Kedua Insentif)

Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023

Tanggal: 15 Februari 2023

Dalam PADG ini mengatur terkait peningkatan total insentif yang dapat diterima bank dari sebelumnya paling tinggi 2% menjadi paling tinggi 2,8%. Di samping itu, peraturan ini juga mengatur penyesuaian pengaturan kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh insentif. Selanjutnya terdapat penyesuaian reklasifikasi 46 (empat puluh enam) subsektor prioritas yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok sektor prioritas yang berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi, kelompok sektor prioritas yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan kelompok sektor prioritas yang menjadi penopang pemulihan ekonomi.

B. Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah

Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023

(Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022)

Tanggal: 1 April 2023

Perubahan pengaturan dalam PADG ini meliputi penyesuaian besaran tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi/pemberian (*'athaya*) setelah mempertimbangkan insentif dalam rangka kebijakan makroprudensial. Dengan diterbitkannya PADG ini, besaran tertentu dari remunerasi kewajiban GWM BUK dalam Rupiah yang diberikan remunerasi menjadi maksimum 7% setelah dikurangi dengan total besaran insentif yang diterima dari kebijakan makroprudensial. Besaran tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM BUS dan UUS dalam Rupiah yang diberikan pemberian (*'athaya*) menjadi paling besr 5,5% setelah dikurangi dengan total besaran insentif yang diterima dari kebijakan makroprudensial.

C. Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

Tanggal: 27 Juni 2023

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini diatur mengenai karakteristik transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF) non USD/IDR lindung nilai kepada Bank Indonesia; Persyaratan bank yang mengajukan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; Persyaratan underlying transaksi yang digunakan dalam transaksi DNDF; ketentuan kewajiban dokumen underlying transaksi; ketentuan perpanjangan

Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; serta sanksi administrative apabila Bank tidak memenuhi kewajiban.

D. Pelindungan Konsumen Bank Indonesia

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

Tanggal: 27 Juni 2023

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah terkait ruang lingkup pelindungan konsumen; prinsip pelindungan konsumen; penanganan pengaduan konsumen oleh BI; pengenaan sanksi; dan mekanisme koordinasi.

E. Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Tanggal: 27 Juni 2023

Pengaturan pada PBI PUVA mencakup 4 (empat) aspek yaitu produk, harga (pricing), pelaku pasar, dan infrastruktur pasar Keuangan (3P+1I). Pada dasarnya materi pengaturan dalam PBI PUVA diselaraskan dengan cakupan pengaturan terkait pasar termasuk IPK yang terdapat dalam UU PPSK, namun substansi pengaturan dalam PBI Pasar Uang (eksisting) masih akan tetap diatur sepanjang tidak bertentangan.

F. Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023

Tanggal: 31 Juli 2023

Ruang lingkup yang diatur dalam PADG ini antara lain mengatur prinsip dan instrumen penempatan DHE SDA, serta pemantauan atas pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia. Kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia perlu dipantau untuk mendukung optimalisasi pemanfaatannya. Selain itu, devisa pembayaran impor juga perlu dipantau pengeluarannya karena dapat memengaruhi permintaan devisa secara nasional dan pasar keuangan di Indonesia.

G. Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

Tanggal: 31 Juli 2023

Pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini meliputi kewajiban eksportir terkait DHE, kewajiban importir melaporkan penerimaan DPI, kewajiban bank terhadap DEH dan DPI, kewajiban LPEI, dan pengawasan oleh BI.

H. Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka

Peraturan: Peraturan Anggota Dewa Gubernur Nomor 8 Tahun 2023

Tanggal: 7 September 2023

PADG ini disusun dengan latar belakang untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan memperkuat integrasi pengelolaan moneter dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan melakukan penguatan kepesertaan dalam pelaksanaan Operasi Moneter berupa implementasi dealer utama (*primary dealer*) dalam Operasi Moneter.

I. Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2023

Tanggal: 8 September 2023

Penyesuaian pengaturan dalam PBI ini meliputi penyesuaian jenis surat berharga sebagai agunan PLJP dan penetapan nilai surat berharga sebagai agunan PLP. Ketentuan lebih lanjut mengenai PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

J. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023

Tanggal: 18 September 2023

PBI ini disusun dengan latar belakang upaya Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan upaya penguatan stimulus kebijakan makroprudensial yang berbasis likuiditas guna menghadapi kecenderungan kredit dan pembiayaan perbankan yang tumbuh melambat di tengah tantangan global dan domestik. Substansi dalam peraturan ini yaitu meliputi ketentuan pemberian KLM oleh BI terkait persyaratan bank, kewajiban bank, dan pengawasan oleh BI.

K. Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/Padg/2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah

Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023

Tanggal: 27 September 2023

Pengaturan dalam PADG ini meliputi penyesuaian besaran tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi/pemberian (*'athaya*) setelah memperhitungkan besaran KLM yang diterima bank.

L. Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2023

Tanggal: 16 November 2023

Bank Indonesia mengembangkan instrumen OPT melalui penerbitan SVBI dan SUVBI sebagai instrumen yang sejalan dengan mekanisme pasar (*pro market*) untuk mendukung pendalaman pasar uang dalam valuta asing yang pada akhirnya mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Dalam PBI ini memuat pengaturan mengenai ketentuan, karakteristik, penatausahaan SUVBI dan SVBI, serta kewajiban peserta operasi moneter.

M. Penerbitan Instrumen Pasar Uang Dan Transaksi Pasar Uang

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2023

Tanggal: 16 November 2023

Dalam PBI ini mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, produk pasar uang, harga acuan, pelaku pasar uang, infrastruktur pasar keuangan, data dan informasi, pelindungan konsumen, pengawasan, dan ketentuan lainnya.

N. Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Tanggal: 12 Januari 2023

Undang-undang ini disusun dengan tujuan: mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif; meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif; meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa

keuangan; meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan; memperluas sumber pembiayaan jangka panjang; meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan; mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko; meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pelindungan konsumen; memperkuat pelindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan; memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan; mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan; memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

O. Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 5/POJK.5/2013)

Tanggal: 10 Februari 2023

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain: a) Penyesuaian ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS; b) Kewajiban memiliki satuan pengawas Internal BPJS sebagai bagian pengawasan "three lines of defense"; c) Mekanisme koordinasi pengawasan antara OJK dan DJSN; d) mekanisme pemeriksaan langsung oleh OJK; e) Penyampaian laporan yang disampaikan BPJS kepada OJK; dan f) Sanksi Administrasi.

P. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

Tanggal: 24 Maret 2023

POJK ini disusun untuk perubahan atas POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Perubahan tersebut untuk: (1) mendukung target pemerintah atas Indeks Inklusi Keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 dan mendukung program Otoritas untuk peningkatan Indeks Literasi Keuangan; (2) mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang dinamis; (3) meningkatkan kuantitas kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan mengoptimalisasikan peran dari PUJK; (4) mengakomodasi dampak perkembangan sektor jasa keuangan dengan tumbuhnya PUJK baru; serta (5) mengoptimalisasikan pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Q. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023

(Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016)

Tanggal: 6 April 2023

penyesuaian atas POJK dimaksud ditujukan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi termasuk pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI).

R. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

(Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016)

Tanggal: 6 April 2023

Beberapa pokok-pokok perubahan Peraturan OJK ini di antaranya berupa penyesuaian definisi, penambahan tiga definisi baru, penyesuaian ketentuan pemisahan aset dan liabilitas, perubahan ketentuan terkait jenis investasi yang dikategorikan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan dasar penilaian investasi, penambahan syarat penempatan Aset Yang Diperkenankan berupa MTN Syariah, penambahan opsi persyaratan untuk penempatan Aset Yang Diperkenankan,

penyesuaian ketentuan batasan maksimum investasi atas aset selain Dana Investasi Peserta, penambahan ketentuan mengenai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada kelompok penerima investasi.

S. Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023

Tanggal: 14 Juni 2023

Dalam POJK ini diatur di antaranya tentang kewajiban PJK dalam Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; pengaturan pengenaan sanksi yang efektif, proporsional dan disuasif; kewajiban PJK dalam menyampaikan Individual Risk Assessment secara periodik kepada OJK, persyaratan dan tata cara kerja sama PJK dengan Pihak Ketiga dalam rangka verifikasi secara tatap muka (*face to face*) dan tidak tatap muka (*non-face to face*) melalui sarana elektronik; kewajiban PJK menyampaikan data untuk kebutuhan pengawasan.

T. Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023

Tanggal: 14 Juli 2023

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pihak-Pihak yang terkait dengan langkah kebijakan dalam menjaga stabilitas Pasar Modal antara lain Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Terbuka, Emiten, dan Manajer Investasi. Diatur tentang parameter kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, bentuk peraturan dan/atau kebijakan terkait penanganan atas kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, persyaratan pembelian kembali saham perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, pengalihan saham hasil pembelian kembali, dan sanksi administratif.

U. Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023

Tanggal: 2 Agustus 2023

Dalam Peraturan ini diatur ketentuan tindak lanjut terkait perdagangan karbon melalui Bursa Karbon yang secara substansi mengatur ketentuan mengenai Unit Karbon yang diperdagangan melalui Bursa Karbon; Persyaratan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon; Permodalan Penyelenggara Bursa Karbon; Pemegang Saham, Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon; Operasional dan Pengendalian Penyelenggara Bursa Karbon; Pengawasan Bursa Karbon; Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggara Bursa Karbon; Perubahan atas Peraturan dan Anggaran Dasar Penyelenggara Bursa Karbon; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Penyelenggara Bursa Karbon; Laporan Penyelenggara Bursa Karbon; serta sanksi.

V. Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023

Tanggal: 4 Agustus 2023

Dalam POJK ini mengatur tentang kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, laporan, pemberitahuan, atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan, tindak lanjut hasil penyidikan, permintaan keterangan dari lembaga jasa keuangan dan pemblokiran rekening, dan administrasi penyidikan.

W. Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023

Dalam POJK ini menagatur antra lain terkait kewajiban bank menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik pada bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, Penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank, dan laporan pelaksanaan tata kelola dan penilaian penerapan tata Kelola.

X. penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023

Tanggal: 10 Oktober 2023

Tanggal: 14 September 2023

Penerbitan POJK ini merupakan upaya OJK untuk mendorong pengembangan efek bersifat utang berlandaskan keberlanjutan dengan mengganti dan memperluas cakupan Efek bersifat utang berwawasan lingkungan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Dengan diterbitkannya POJK ini, maka Efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) berlandaskan keberlanjutan dapat berupa EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, Sukuk Wakaf, EBUS Terkait Keberlanjutan, dan EBUS berlandaskan keberlanjutan lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gd. R.M. Notohamiprodjo

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat -
10710 Telp. +62 21 3441484

fiskal.kemenkeu.go.id

9 772527 314007